

## BAB 4 PEMBAHASAN

### 4. 1. Kuantitatif

Penentuan apakah pertumbuhan yang terjadi bersifat pro poor (*pro poor growth*) dalam penelitian ini digunakan *Growth Incidence Curves* (GIC). GIC menunjukkan tingkat pertumbuhan dalam periode tertentu pada setiap percentile dari distribusi yang diurut dari pendapatan atau konsumsi percapita, (Ravallion dan Chen :2003).

Pemilihan 3 periode sebagai waktu penelitian untuk membandingkan periode pertumbuhan rendah dan periode pertumbuhan tinggi. Tahun 1999 – 2002 sebagai periode pertumbuhan rendah, Tahun 2002 – 2005 sebagai periode pertumbuhan tinggi. Sedangkan periode 1999 – 2005 digunakan untuk melihat karakteristik pertumbuhan sepanjang periode penelitian.

Tahun 1999 – 2005 sebagai periode pertumbuhan rendah dimana pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi dicapai oleh Jakarta Pusat sebesar 4,12% dan terendah di Jakarta Timur sebesar 3,51%. Begitu juga dengan pertumbuhan sepanjang periode 1999 – 2002, pertumbuhan tertinggi tetap di Jakarta Pusat, sebesar 12,84% dan terendah di Jakarta Utara, sebesar 10,74%.

Sedangkan tahun 2002 – 2005 sebagai periode pertumbuhan tinggi, dimana pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi dicapai oleh Jakarta Pusat sebesar 5,75% dan terendah di Jakarta Barat sebesar 5,59%. Begitu juga dengan pertumbuhan sepanjang periode 1999 – 2002, pertumbuhan tertinggi tetap di Jakarta Pusat, sebesar 18,27% dan terendah di Jakarta Barat, sebesar 17,76%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 4.1. Pertumbuhan Tahunan dan Pertumbuhan Sepanjang Tahun di 5 Kota Administrasi di DKI Jakarta pada tahun 1999 - 2005

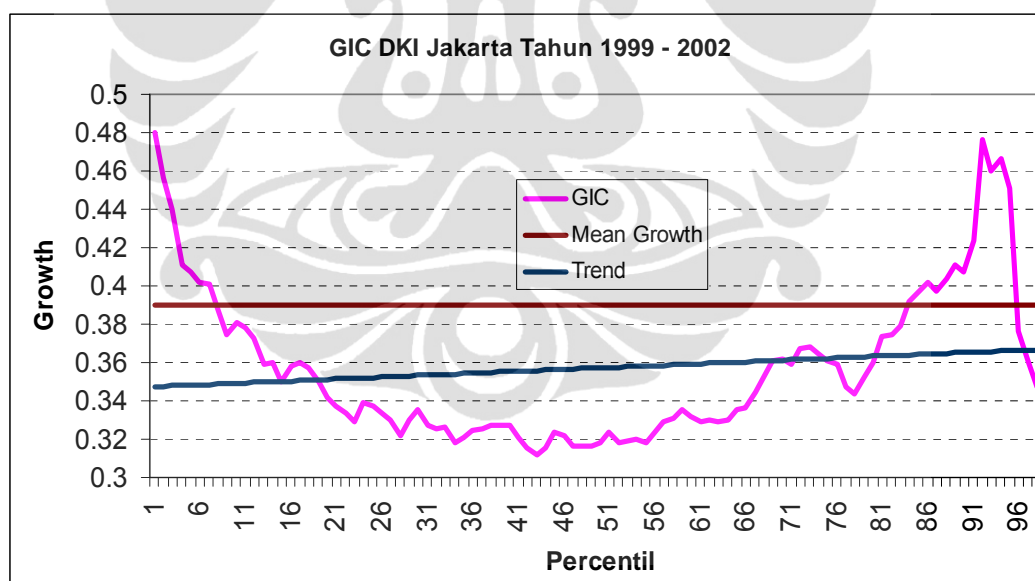
Kota Administrasi	1999-2002		2002-2005	
	Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan (%)	Pertumbuhan Sepanjang periode (%)	Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan (%)	Pertumbuhan Sepanjang periode (%)
Jakarta Selatan	3,65	11,37	5,74	18,22
Jakarta Timur	3,51	10,89	5,68	18,02
Jakarta Pusat	4,12	12,84	5,75	18,27
Jakarta Barat	4,01	12,51	5,59	17,76
Jakarta Utara	3,46	10,74	5,67	17,98
DKI Jakarta*	3,75	11,67	5,67	18,05

\* Tanpa Kabupaten Kepulauan Seribu

Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

#### 4.1.1. GIC DKI Jakarta

Gambar 4.1. GIC DKI Jakarta Tahun 1999 – 2002



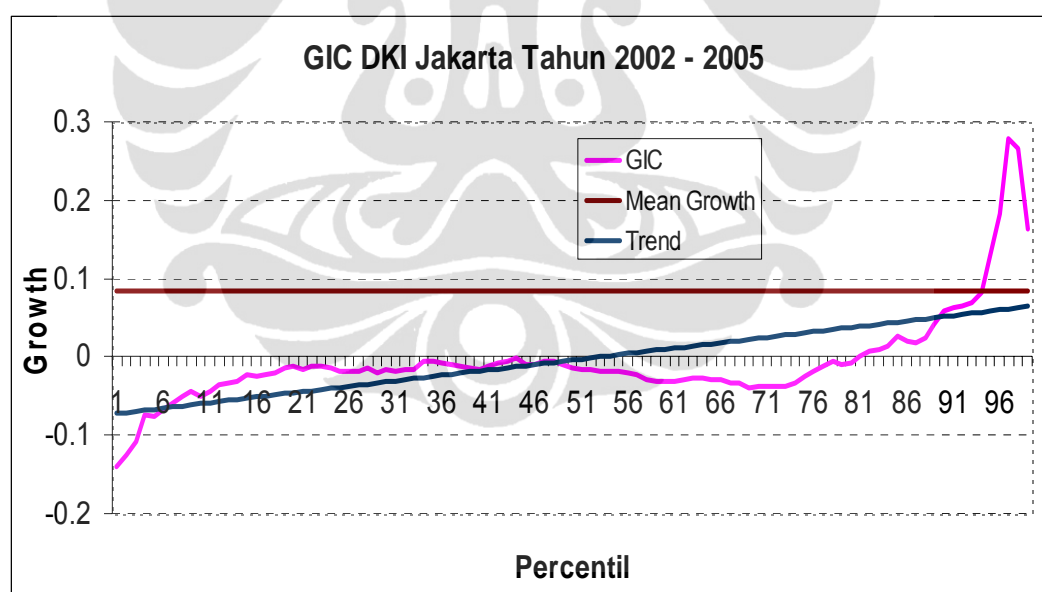
Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di DKI Jakarta pada tahun 1999 - 2002 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di DKI Jakarta sampai dengan 48% dengan rata-rata pertumbuhan 39%. PDRB sepanjang tahun 1999 – 2002, meningkat sampai 11,67%, namun peningkatan konsumsi mencapai 48%. Dan angka

kemiskinan pada periode ini berkisar antara 3,1 % sampai 4,9% dari total penduduk DKI Jakarta.

Pertumbuhan di DKI Jakarta pada tahun 1999 – 2002 bisa dikategorikan tidak *pro poor growth*, dimana *Growth Incidence Curves* tidak berbentuk seperti huruf ‘u’ terbalik. Selain itu garis trend menunjukkan *slope* positif, dimana pertumbuhan lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. 8% penduduk yang berada di percentil paling bawah merasakan manfaat pertumbuhan diatas rata-rata yakni 39%– 48%. Sedangkan penduduk menengah, yakni pada percentil 7 - 85 berada di bawah garis rata-rata (32% – 39%). Sedangkan kelompok menengah atas, percentil 86 – 95, menikmati pertumbuhan diatas rata-rata, yakni 32% – 39% sama dengan kelompok percentil terbawah. Namun kelompok percentil atas (96 – 100) menikmati pertumbuhan di bawah rata-rata 35%– 39%.

Gambar 4.2. GIC DKI Jakarta Tahun 2002 – 2005



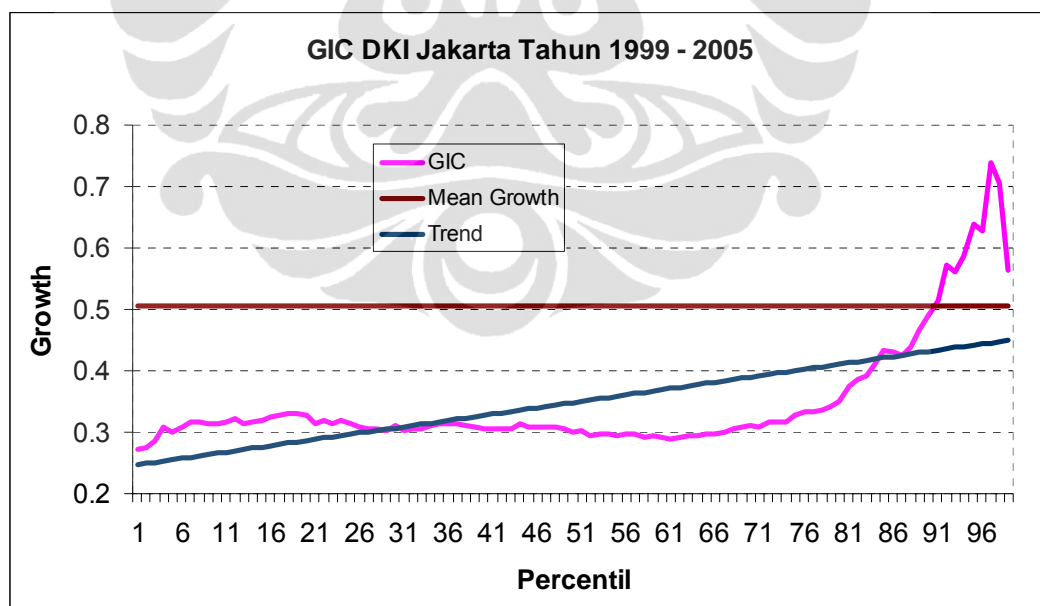
Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di DKI Jakarta pada tahun 2002 - 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di DKI Jakarta sampai dengan 27% dengan rata-rata pertumbuhan 9%. PDRB sepanjang tahun 2002 - 2005, meningkat sampai 18.04%, namun peningkatan konsumsi mencapai 27%. Dan angka

kemiskinan pada periode ini setiap tahunnya berkisar antara 3,18% sampai 3,61% dari total penduduk DKI Jakarta.

Pertumbuhan di DKI Jakarta pada tahun 2002 - 2005 dikategorikan tidak *pro poor growth*, dimana *Growth Incidence Curves* berbentuk tidak seperti huruf 'u' terbalik. Selain itu garis trend menunjukkan *slope* positif, dimana pertumbuhan lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. 8% penduduk yang berada dipersentil paling bawah merupakan kelompok yang paling tidak merasakan manfaat pertumbuhan (Pertumbuhan negatif) yakni, ((-16%)-(-5%)) Sedangkan penduduk menengah, yakni pada persentil 9 - 80 masih merasakan pertumbuhan negatif namun sedikit meningkat dari persentil terbawah ((-5%)-0%). Sedangkan kelompok menengah atas, persentil 80 - 94, menikmati pertumbuhan sampai dengan garis rata-rata, yakni 0% - 9%. Namun kelompok persentil atas (93 - 100) menikmati pertumbuhan jauh diatas kelompok lainnya yakni 10% - 27%.

Gambar 4.3. GIC DKI Jakarta Tahun 1999 - 2005



Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di DKI Jakarta pada tahun 1999 - 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di DKI Jakarta sampai dengan 73% dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi 50%.

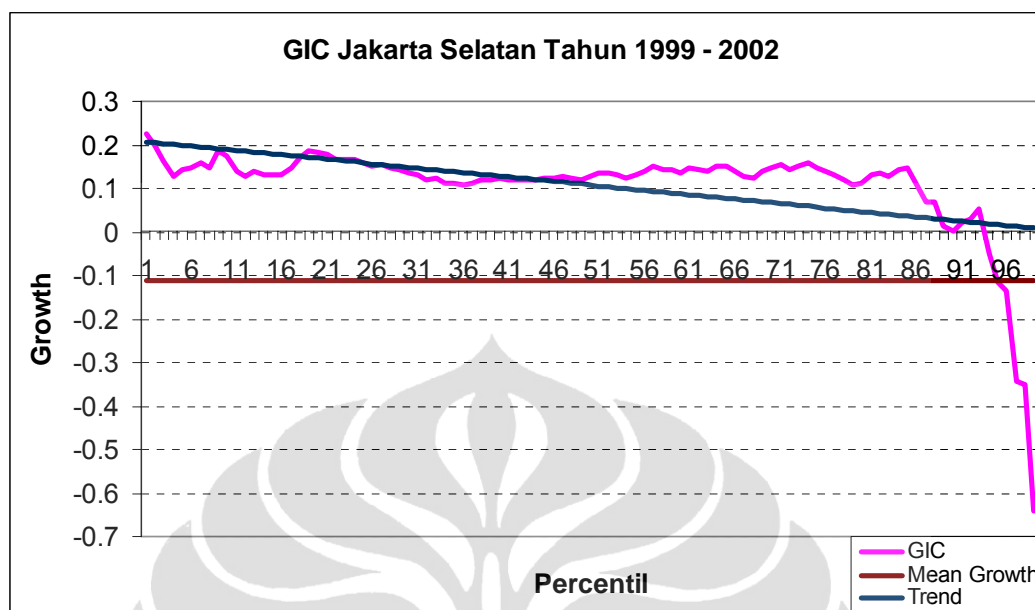
Pertumbuhan di DKI Jakarta pada tahun 1999 - 2005 dikategorikan tidak *pro poor growth*, dimana *Growth Incidence Curves* berbentuk tidak seperti huruf 'u' terbalik. Selain itu garis trend menunjukkan *slope* positif, dimana pertumbuhan lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. 90 persen penduduk yang berada dipersentil terbawah merasakan pertumbuhan di bawah garis rata-rata, yakni 27% - 50%. Sedangkan 10% penduduk dengan konsumsi tertinggi merasakan pertumbuhan 50% - 73%

Dari GIC DKI Jakarta, dapat disimpulkan;

1. Walaupun secara keseluruhan kedua periode tersebut dikategorikan tidak *pro poor growth*. Namun, periode krisis (1999 – 2002) dengan PDRB rata – rata pertahun 3.7%, lebih *Pro poor growth* dibandingkan periode tahun 2002 – 2005 dengan PDRB rata – rata pertahun 5.6%. Dan jika digabungkan, menunjukkan periode pertumbuhan tinggi lebih dominan daripada periode pertumbuhan rendah, yang mana periode 1999 – 2005 sangat tidak *pro poor growth*.
2. Terpenuhinya hipotesis pertama; cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro, tidak sepenuhnya tepat karena pertumbuhan tidak dinikmati oleh orang miskin, tetapi lebih dinikmati oleh orang kaya.
3. Pada periode 1999 - 2002, dengan PDRB sepanjang periode 11.6% peningkatan konsumsi naik sampai 48%, namun periode 2002 – 2005 dengan pertumbuhan selama periode mencapai 18%, konsumsi hanya naik 27% itupun hanya dinikmati oleh 20 % penduduk sedangkan sisanya harus merasakan pertumbuhan negatif. Selama periode penelitian (1999 – 2005) konsumsi naik mencapai 73% namun hanya dinikmati oleh 10% penduduk terkaya.

#### 4.1.2. GIC Jakarta Selatan

Gambar 4.4. GIC Jakarta Selatan Tahun 1999 - 2002

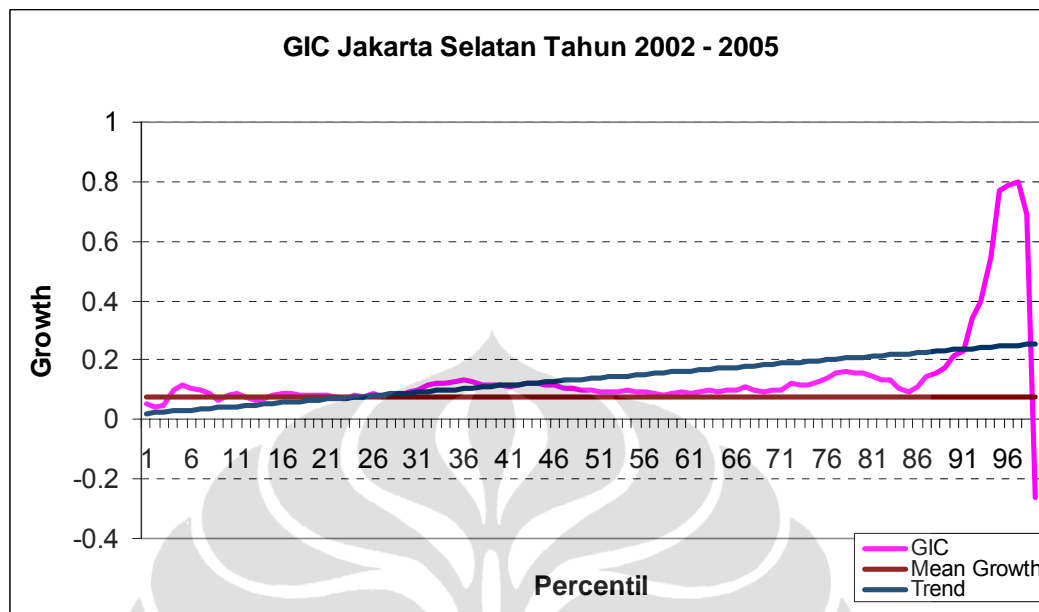


Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 1999 - 2002 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Selatan hanya mencapai 22% dengan rata-rata berada dibawah garis 0 yakni (-11%). PDRB Jakarta Selatan sepanjang tahun 1999 – 2002, meningkat sampai 11,4%, dan peningkatan konsumsi mencapai 22%.

Pertumbuhan di Jakarta Selatan pada tahun 1999 – 2002 bisa dikategorikan pro poor, walaupun *Growth Incidence Curves* tidak seperti huruf ‘u’ terbalik, namun penduduk miskin lebih merasakan manfaat pertumbuhan daripada penduduk menengah atas. Selain itu garis trend menunjukkan *slope* negatif, dimana pertumbuhan lebih menguntungkan orang miskin daripada orang kaya. 1 - 86 percentil penduduk yang paling merasakan manfaat pertumbuhan diatas rata-rata 11% – 22%. Sedangkan penduduk menengah, yakni pada percentil 87 – 93 hanya menikmati 0 – 11%. Sedangkan kelompok menengah atas, percentil 93 – 100, mengalami pertumbuhan negatif (-62%) sampai 0%). Pertumbuhan negatif kelompok menengah atas inilah yang menggerus *mean* (rata-rata) dari GIC Jakarta Selatan periode 1999 – 2005

Gambar 4.5. GIC Jakarta Selatan Tahun 2002 – 2005

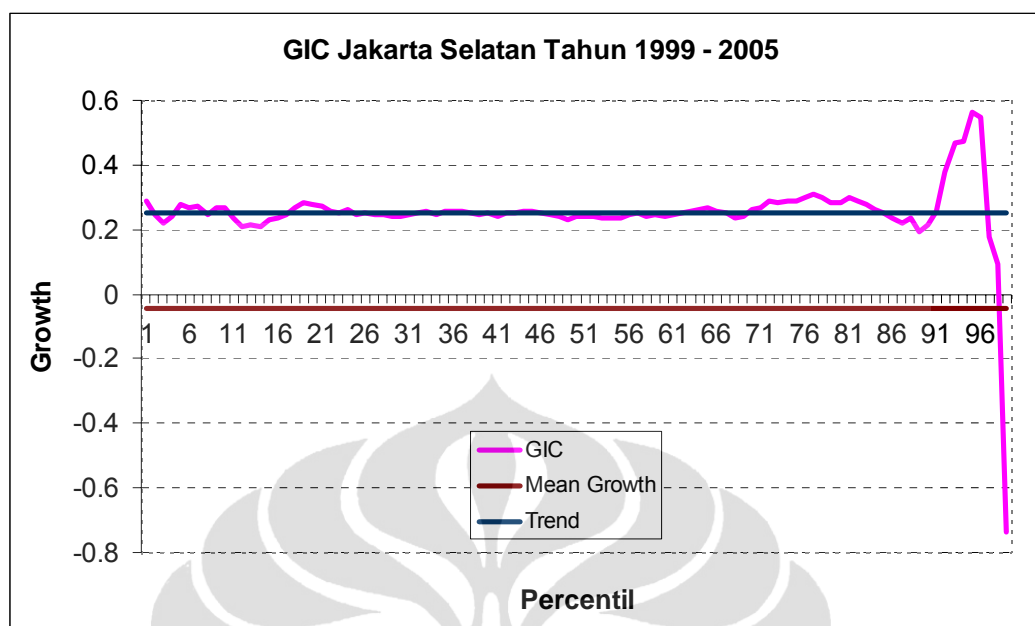


Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2002 – 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Selatan hanya mencapai 80% namun rata-rata GIC hanya berada pada level 8%. PDRB Jakarta Selatan sepanjang tahun 2002 – 2005, meningkat sampai 18.2%, namun peningkatan konsumsi mencapai 80 %.

Pertumbuhan Jakarta Selatan pada tahun 2002 – 2005 bisa dikategorikan sangat tidak pro poor, dimana penduduk menengah atas lebih merasakan manfaat pertumbuhan daripada penduduk yang lebih miskin. Selain itu garis trend menunjukkan *slope* positif, dimana pertumbuhan lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. 2 Percentil terbawah berada dibawah rata-rata GIC, yakni 50% – 80%. Sedangkan 3 - 86 percentil penduduk berada sedikit diatas rata-rata, yakni, 8% – 15%. Sedangkan yang paling merasakan manfaat pertumbuhan adalah penduduk menengah atas, yakni pada percentil 87 – 97 dengan menikmati 16% – 80% manfaat pertumbuhan. Sedangkan kelompok menengah atas, 3 percentil teratas, mengalami pertumbuhan negatif sampai dengan (-22%).

Gambar 4.6. GIC Jakarta Selatan Tahun 1999 – 2005



Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 1999 – 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Selatan hanya mencapai 59% namun rata-rata GIC hanya berada di bawah 0%.

Pertumbuhan Jakarta Selatan pada tahun 1999 – 2005 cenderung tidak *pro poor*, walaupun tidak bisa langsung dikategorikan *pro poor* atau tidak *pro poor*, dimana 90% penduduk di percentil terbawah mengalami pertumbuhan konsumsi yang sama yakni pada 20 -30%. Sedangkan percentil 91 – 87 menikmati pertumbuhan sampai 59% namun 3 persen penduduk di percentil teratas mengalami pertumbuhan negatif sampai 75%. Hal inilah yang membuat garis trend cenderung stabil.

Dari GIC Jakarta Selatan, dapat disimpulkan;

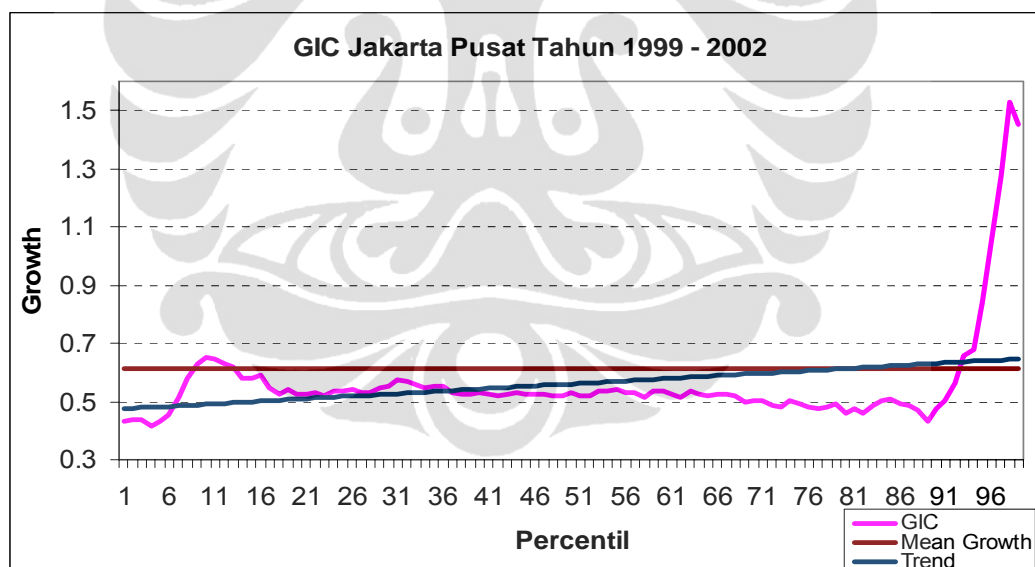
1. Periode krisis (1999 – 2002) *Pro poor growth* dibandingkan periode tahun 2002 – 2005. Jika digabungkan kedua periode tersebut stabil namun cenderung tidak *pro poor growth*.



2. Terpenuhinya hipotesis pertama; cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro, tidak sepenuhnya tepat karena pertumbuhan tidak dinikmati oleh orang miskin, tetapi lebih dinikmati oleh orang kaya.
3. Pada periode 1999 - 2002, dengan PDRB Jakarta Selatan sepanjang periode 1999 - 2002, 11.36 % peningkatan konsumsi naik sampai 22%, namun periode 2002 - 2005 dengan pertumbuhan selama periode mencapai 18%, konsumsi naik 80% namun hanya dinikmati oleh 10 % penduduk sedangkan sisanya hanya menikmati 8% - 15%. Dan kelompok termiskin, jika pada masa krisis menikmati sampai 22%, pada periode 2002 - 2005 malah turun 5% - 8%. Sehingga pertumbuhan Jakarta Selatan selain lebih dinikmati oleh orang kaya juga membuat hidup orang miskin lebih sulit.

#### 4.1.3. GIC Jakarta Pusat

Gambar 4.7. GIC Jakarta Pusat Tahun 1999 - 2002

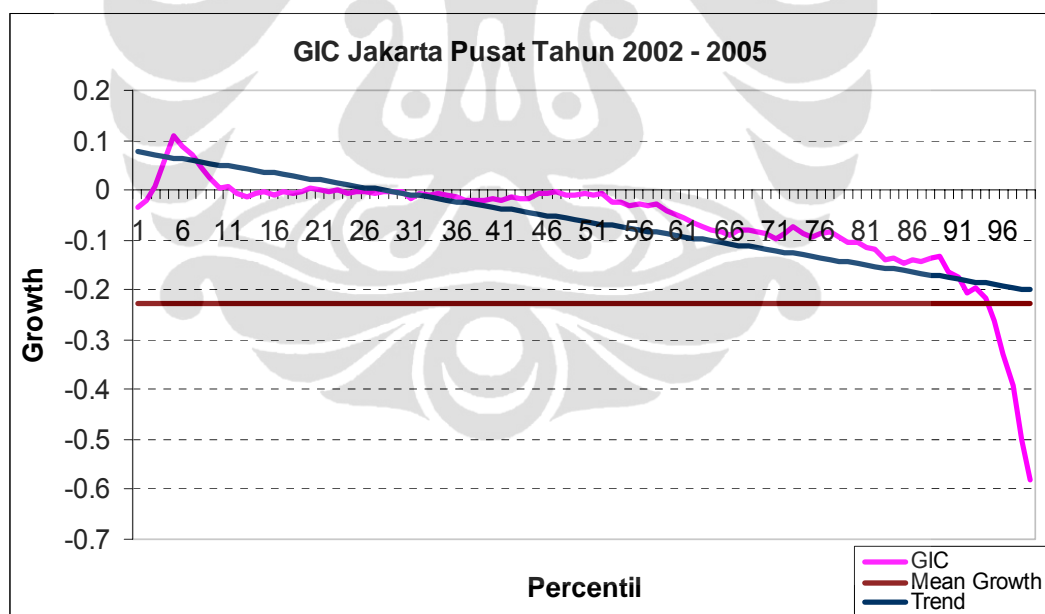


Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 1999 - 2002 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Pusat mencapai 150% dengan rata-rata 70%. PDRB Jakarta Pusat sepanjang tahun 1999 - 2002, meningkat sampai 12.8%, dan peningkatan konsumsi mencapai 150%.

Pertumbuhan Jakarta Pusat pada tahun 1999 – 2002 dikategorikan tidak *pro poor growth*, selain *Growth Incidence Curves* tidak seperti huruf ‘u’ terbalik, penduduk kaya lebih merasakan manfaat pertumbuhan daripada penduduk miskin. Selain itu garis trend menunjukkan slope positif, dimana pertumbuhan lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. Penduduk pada percentil terbawah merasakan manfaat pertumbuhan dibawah rata-rata, yakni 41% – 60%, hanya penduduk pada percentil 8 – 12 yang merasakan manfaat diatas rata-rata, itupun hanya merasakan 60% - 63%. Sedangkan mayoritas penduduk yakni pada percentil ke 13 sampai percentil 92 merasakan manfaat bertumbuhan berkisar pada 43% – 61%. Sedangkan sisanya yakni pada percentil teratas merasakan pertumbuhan sampai 150%. Dan 8 percentil teratas penduduk Jakarta Pusat merasakan pertumbuhan 2 kali lipat lebih besar dari pada 92% penduduk Jakarta Pusat lainnya.

Gambar 4.8. GIC Jakarta Pusat Tahun 2002 – 2005



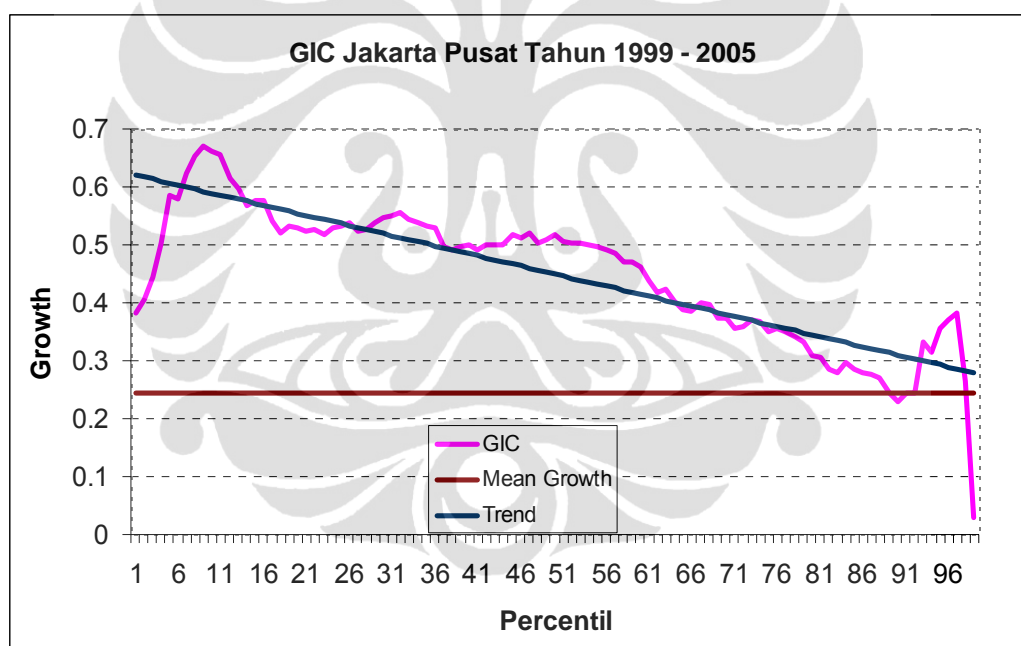
Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2002 – 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Pusat hanya mencapai 10% dan rata-rata GIC hanya berada pertumbuhan negatif pada level (-22%). PDRB Jakarta Pusat sepanjang tahun 2002 – 2005, meningkat sampai

18.26%, tertinggi dibandingkan kota administrasi lainnya, namun peningkatan konsumsi hanya mencapai 10%.

Pertumbuhan di Jakarta Pusat pada tahun 2002 – 2005 bisa dikategorikan pro poor, dimana penduduk pada percentil terbawah (1-11) lebih merasakan manfaat pertumbuhan daripada penduduk yang lebih kaya, 10 percentil teratas. Garis trend juga menunjukkan slope positif, dimana pertumbuhan lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. Sedangkan Penduduk Jakarta Pusat pada percentil 12 sampai percentil 50 tidak merasakan pertumbuhan, (0%). Pada percentil menengah atas 51 – 93, pertumbuhan negatif sampai (-20%), sedangkan sisanya terjun bebas sampai (-60%).

Gambar 4.9. GIC Jakarta Pusat Tahun 1999 – 2005



Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 1999 – 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Pusat mencapai 68% dan rata-rata GIC berada pada level (24%).

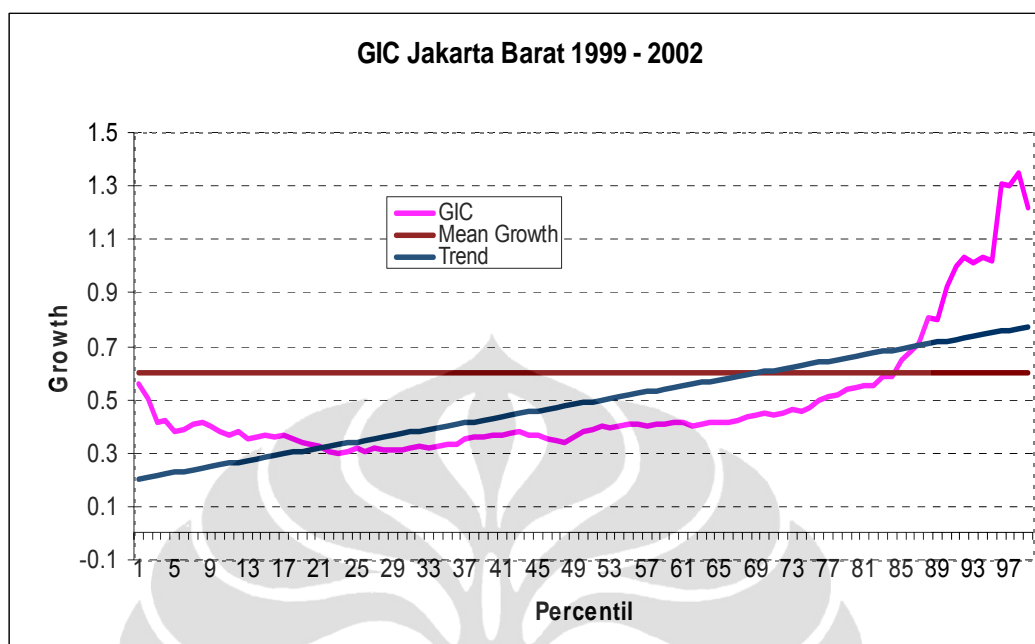
Pertumbuhan di Jakarta Pusat pada tahun 1999 – 2005 bisa dikategorikan *pro poor*, dimana 10% penduduk pada percentil terbawah lebih merasakan manfaat pertumbuhan (39% - 69%) daripada penduduk yang lebih kaya, 10 percentil teratas (2% - 39%) . Garis trend juga menunjukkan slope negatif, dimana pertumbuhan lebih menguntungkan orang miskin daripada orang kaya. Sedangkan 80% Penduduk Jakarta Pusat lainnya menikmati pertumbuhan diatas rata-rata yakni 24% - 58%.

Dari GIC Jakarta Pusat, dapat disimpulkan;

1. Berbeda dengan GIC daerah lain, periode tahun 2002 – 2005 lebih *pro poor growth* dibandingkan Periode krisis (1999 – 2002). Secara keseluruhan periode, pertumbuhan Jakarta pusat adalah *pro poor growth*.
2. Tidak Terpenuhinya hipotesis pertama sehingga dalam pertumbuhan Jakarta Pusat; cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro, tepat karena pertumbuhan lebih dinikmati oleh orang miskin, daripada orang kaya.
3. Pada periode 1999 - 2002, dengan PDRB Jakarta Pusat sepanjang periode 1999 – 2002, 12.8% peningkatan konsumsi naik sampai 150%, dan periode 2002 – 2005 dengan pertumbuhan selama periode mencapai 18.2%, konsumsi naik 10%.

#### 4.1.4. GIC Jakarta Barat

Gambar 4.10. GIC Jakarta Barat Tahun 1999 – 2005

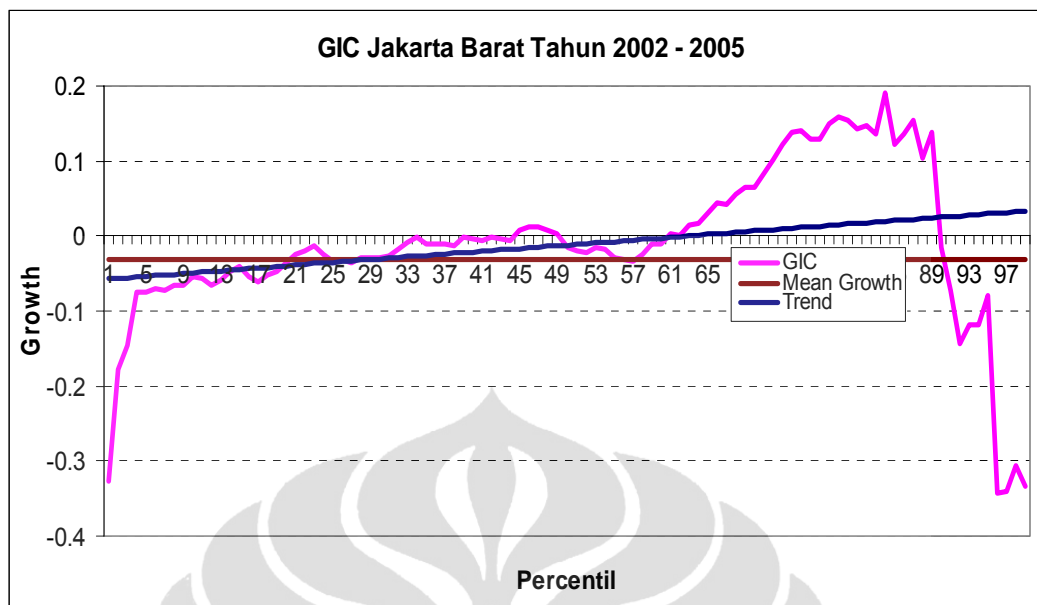


Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Jakarta Barat pada tahun 1999 - 2002 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Barat sampai dengan 135% dengan rata-rata pertumbuhan 60%. PDRB sepanjang tahun 1999 – 2002, meningkat sampai 12.5%, dan peningkatan konsumsi mencapai 135%.

Pertumbuhan DKI Jakarta pada tahun 1999 – 2002 dikategorikan tidak *pro poor*, selain *Growth Incidence Curves* seperti huruf 'u'. Selain itu garis trend menunjukkan *slope* positif, dimana pertumbuhan lebih dinikmati orang kaya daripada orang miskin. Bahkan 10% penduduk yang berada dipersentil paling atas merasakan manfaat pertumbuhan 2 kali lipat lebih besar daripada 90% penduduk lainnya. yakni 60% – 150%. Sedangkan 10% penduduk miskin hanya merasakan pertumbuhan 40% - 60%.

Gambar 4.11. GIC Jakarta Barat Tahun 2002 - 2005

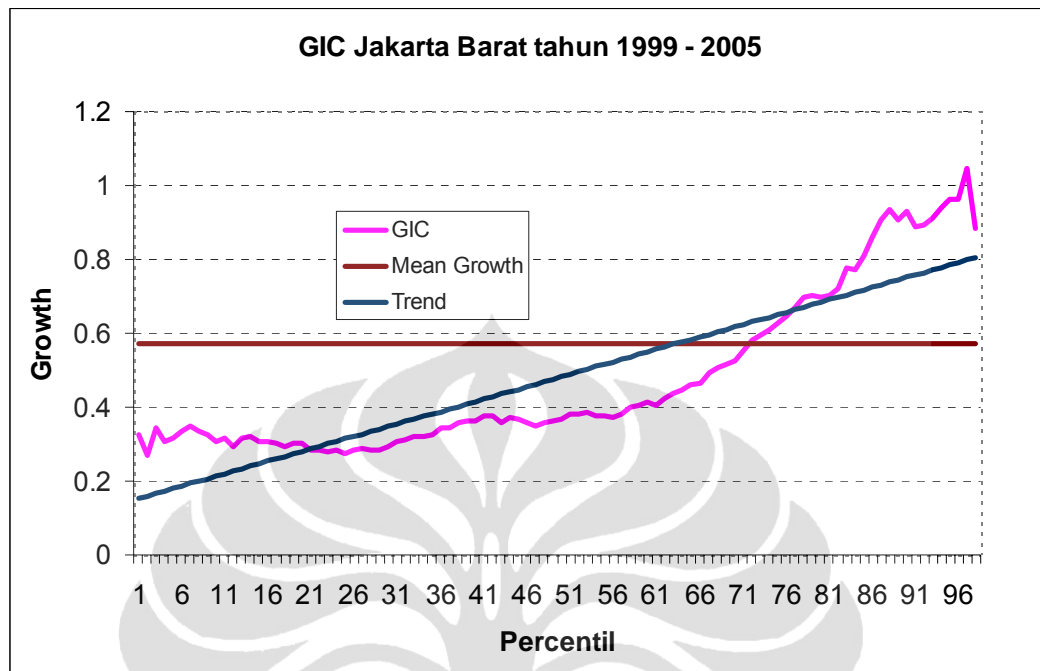


Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Jakarta Barat pada tahun 2002-2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Barat sampai dengan 18% dengan rata-rata pertumbuhan negatif dibawah 0%. PDRB sepanjang tahun 2002 - 2005, meningkat sampai 12,5%, namun peningkatan konsumsi hanya mencapai 18%.

Pertumbuhan Jakarta Barat pada tahun 2002 - 2005 secara absolut spertinya *pro poor*, dimana *Growth Incidence Curves* seperti huruf 'u' terbalik. Dan jika diamati lebih jauh, secara relatif, 5 persen penduduk dengan konsumsi terendah merasakan pertumbuhan negatif sampai 33%. Walaupun ini juga dirasakan oleh 5 penduduk pada percentil teratas. Sedangkan menengah atas pada percentil pada 60 – 90 merasakan pertumbuhan sampai 18%. Jika dibandingkan dengan menengah bawah, pada percentil 6 – 59 yang merasakan pertumbuhan negatif sampai (-18%). Tetapi garis trend yang memperlihatkan *slope* positif memperjelas bahwa pertumbuhan di Jakarta Barat adalah tidak *pro poor growth*.

Gambar 4.12.. GIC Jakarta Barat Tahun 1999 - 2005



Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Jakarta Barat pada tahun 1999 - 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Barat sampai dengan 105% dengan rata-rata pertumbuhan 58%.

Pertumbuhan DKI Jakarta pada tahun 1999 – 2005 dikategorikan tidak *pro poor*, selain *Growth Incidence Curves* seperti huruf ‘u’, garis trend juga menunjukkan *slope* positif, dimana pertumbuhan lebih dinikmati orang kaya daripada orang miskin. 70% penduduk di percentil terbawah dibawah garis rata-rata yakni 25% - 58%. Sedangkan 30% lainnya menikmati pertumbuhan sampai 105%, 4 kali lebih besar daripada percentil terbawah.

Dari GIC Jakarta Barat, dapat disimpulkan;

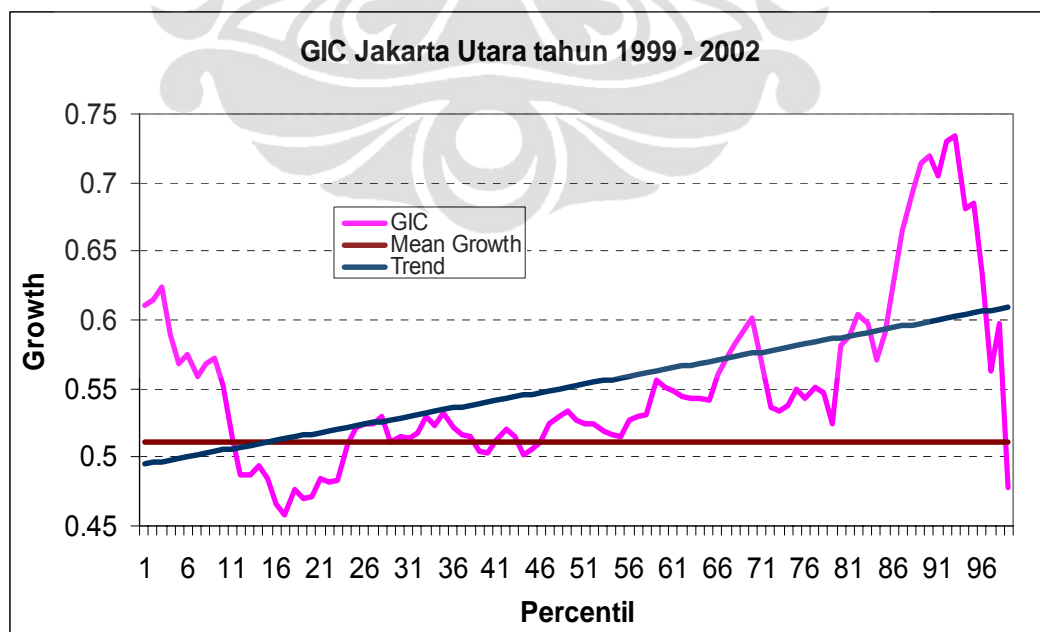
1. Pertumbuhan Jakarta Barat baik Periode 1999 – 2002 maupun periode 2002 – 2005 tidak *pro poor growth*. Namun, periode krisis lebih menguntungkan masyarakat baik miskin maupun kaya daripada periode

pertumbuhan tinggi (2002 – 2005), sehingga dalam GIC seluruh penelitian menunjukkan pertumbuhan Jakarta Barat sangat tidak *pro poor*.

2. Terpenuhinya hipotesis pertama sehingga dalam pertumbuhan Jakarta Barat; cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro tidak tepat karena pertumbuhan lebih dinikmati oleh orang kaya, daripada orang miskin.
3. Pada periode 1999 - 2002, dengan PDRB Jakarta Barat sepanjang periode 1999 – 2002, 12.5 % peningkatan konsumsi naik sampai 135% , dan periode 2002 – 2005 dengan pertumbuhan selama periode mencapai 18%, konsumsi naik 18% dan dinikmati oleh 30% penduduk sedangkan sisanya harus merasakan pertumbuhan negatif (-33% - 0%). Dan kelompok termiskin, jika pada masa krisis menikmati sampai 55%, pada periode 2002 – 2005 malah harus merasakan pertumbuhan negatif sampai -33% Sehingga pertumbuhan Jakarta Barat selain lebih dinikmati oleh orang kaya juga membuat hidup orang miskin lebih sulit.

#### 4.1.5. GIC Jakarta Utara

Gambar 4.13. GIC Jakarta Utara Tahun 1999 – 2002



Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

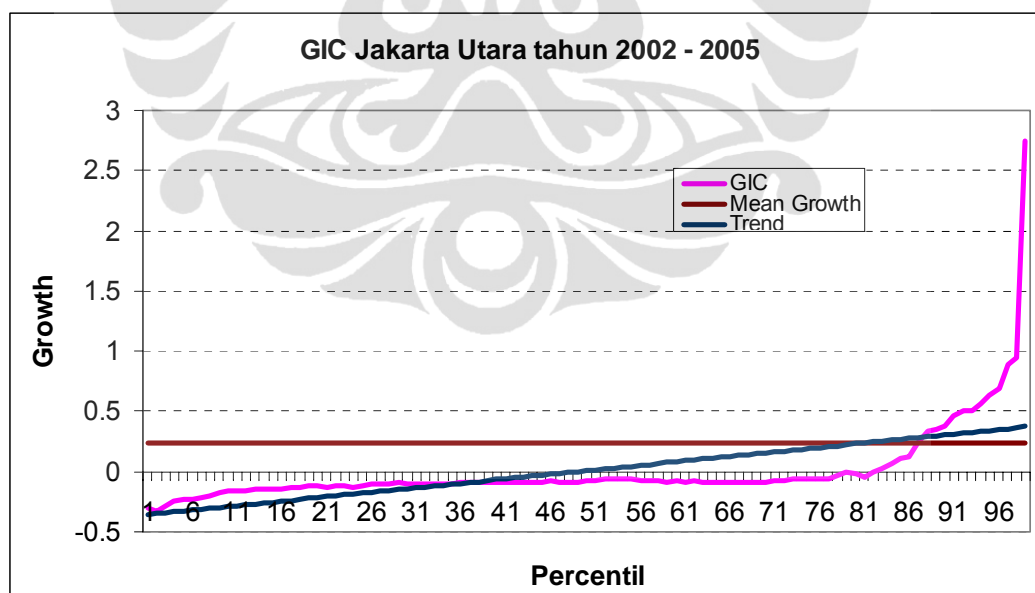


*Growth Incidence Curves* di Jakarta Utara pada tahun 1999 - 2002 menunjukkan pertumbuhan konsumsi Jakarta Utara sampai dengan 72% dengan rata-rata pertumbuhan 52%. PDRB sepanjang tahun 1999 - 2002, meningkat sampai 10.7%, dan peningkatan konsumsi mencapai 72%.

Jika diamati, dari percentil 1 sampai 85, kurva membentuk huruf 'u' dengan pertumbuhan 45% - 60%, hanya pada penduduk pada percentil 10-25 yang merasakan pertumbuhan dibawah rata-rata namun hanya sampai 45%. Begitu juga pada penduduk di 10 percentil teratas, yang juga menikmati pertumbuhan sampai 72%.

Secara menyeluruh, pertumbuhan Jakarta Utara pada tahun 1999 - 2002 cenderung tidak *pro poor* karena selain tidak berbentuk seperti huruf 'u' terbalik. Garis trend juga menunjukkan *slope* positif. Bahkan kalangan miskin yang menikmati pertumbuhan diatas rata-rata hanya 10% sedangkan kalangan atas yang menikmati pertumbuhan diatas rata-rata mencapai 50%.

Gambar 4.14. GIC Jakarta Utara Tahun 2002 - 2005



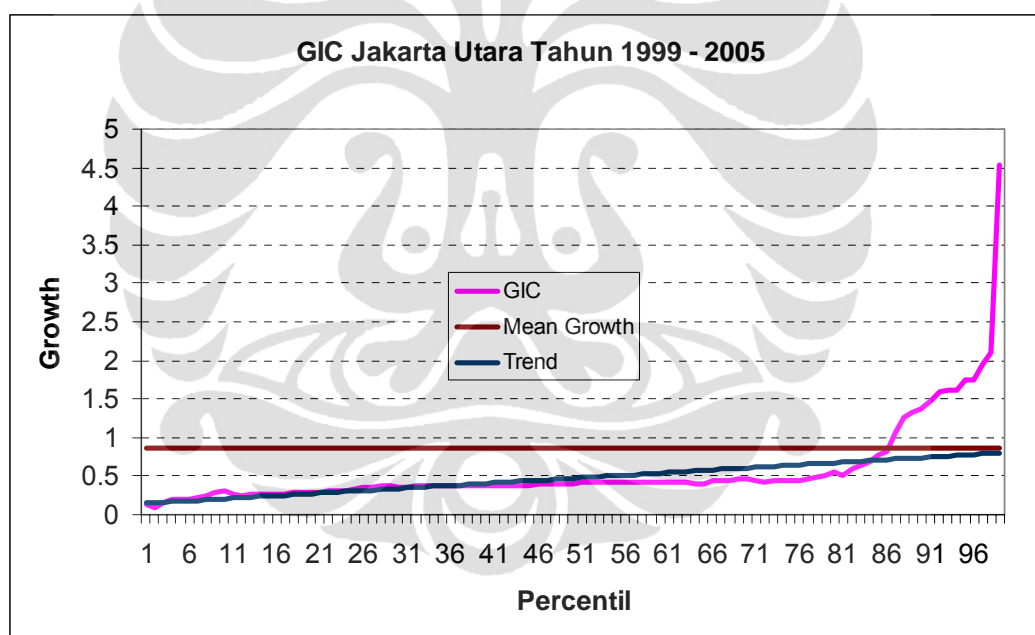
Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2002 - 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi Jakarta Utara mencapai 270%

namun rata-rata pada level 25%. PDRB Jakarta Utara sepanjang tahun 2002 - 2005, meningkat sampai 17,9%.

Pertumbuhan Jakarta Utara pada tahun 2002 – 2005 dikategorikan tidak *pro poor growth*, selain *Growth Incidence Curves* tidak seperti huruf ‘u’ terbalik. Garis trend juga menunjukkan *slope* positif. Yang berarti penduduk kaya lebih merasakan manfaat pertumbuhan daripada penduduk miskin. Bahkan, 80% penduduk Jakarta Utara merasakan pertumbuhan negatif sampai dengan -30%, sedangkan menengah atas (percentil 81-97) menikmati pertumbuhan sampai dengan 100%. bahkan 3% penduduk terkaya menikmati pertumbuhan sampai dengan 210%.

Gambar 4.15. GIC Jakarta Utara Tahun 1999 – 2005



Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 1999 – 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi Jakarta Utara mencapai 450% namun rata-rata pada level 90%

Pertumbuhan Jakarta Utara pada tahun 1999 – 2005 dikategorikan tidak *pro poor growth*, selain *Growth Incidence Curves* tidak seperti huruf ‘u’ terbalik.

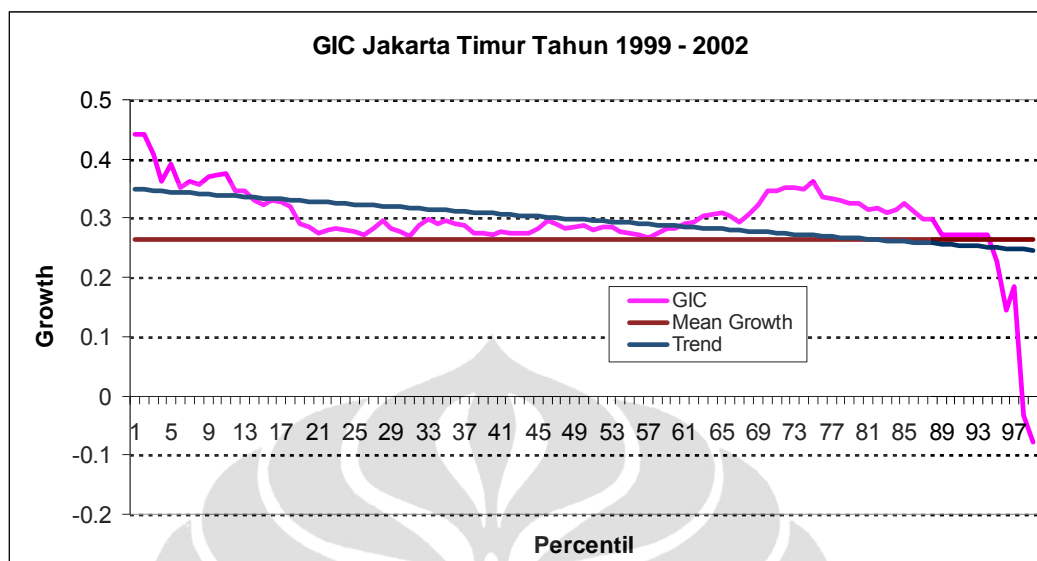
Garis trend juga menunjukkan *slope* positif. Yang berarti penduduk kaya lebih merasakan manfaat pertumbuhan daripada penduduk miskin. Bahkan, 85% penduduk Jakarta Utara merasakan pertumbuhan dibawah garis rata-rata yakni 0% - 90%. Sedangkan penduduk di percentil 86 - 97 menikmati pertumbuhan sampai 200%. Bahkan 3 persen penduduk teratas menikmati pertumbuhan konsumsi sampai 450%.

Dari GIC Jakarta Utara, dapat disimpulkan;

1. Pertumbuhan Jakarta Utara baik Periode 1999 – 2002 maupun periode 2002 – 2005 tidak *pro poor growth*. Namun periode 1999 – 2002 lebih *pro poor growth* jika dibandingkan dengan periode 2002 – 2005. Sehingga jika kedua periode digabungkan maka pertumbuhan menjadi sangat tidak *pro poor*.
2. Terpenuhinya hipotesis pertama; cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro, tidak sepenuhnya tepat karena pertumbuhan tidak dinikmati oleh orang miskin, tetapi lebih dinikmati oleh orang kaya.
3. Pada periode 1999 - 2002, dengan PDRB Jakarta Utara sepanjang periode 1999 – 2002, 10.7 % peningkatan konsumsi naik sampai 270 %, namun periode 2002 – 2005 dengan pertumbuhan selama periode mencapai 18%, konsumsi naik 270 % namun hanya dinikmati oleh 20 % penduduk sedangkan sisanya, 80% penduduk malah merasakan pertumbuhan negatif (-30%). Dan kelompok termiskin, jika pada masa krisis menikmati pertumbuhan sampai 62 %, pada periode 2002 – 2005 malah mengalami penurunan. Sehingga pertumbuhan di Jakarta Utara selain lebih dinikmati oleh penduduk yang kaya juga membuat hidup orang miskin lebih sulit.

#### 4.1.6. GIC Jakarta Timur

Gambar 4.16. GIC Jakarta Timur Tahun 1999 - 2002

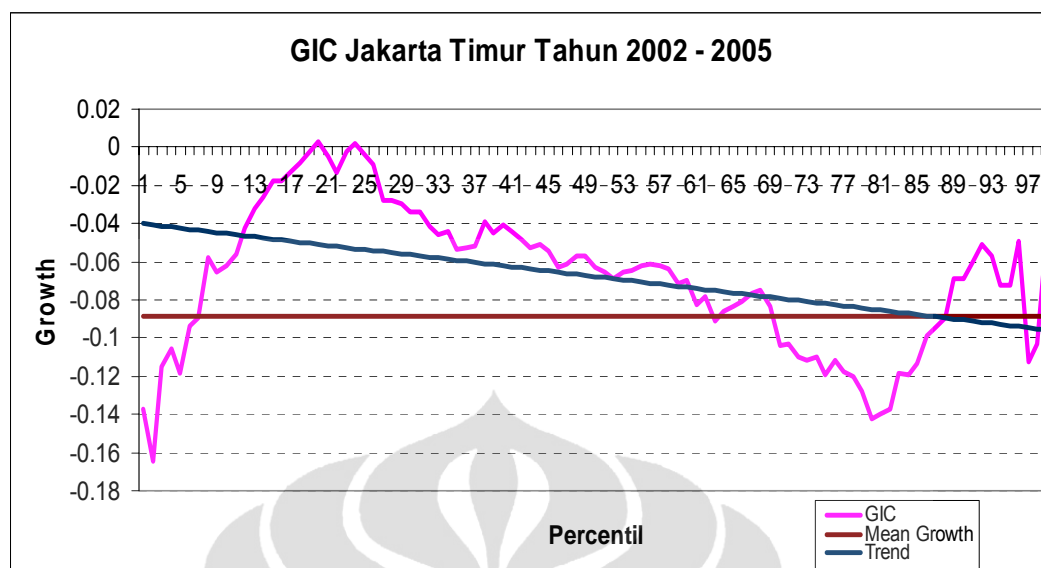


Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 1999 - 2002 menunjukkan pertumbuhan Jakarta Timur mencapai 45% dengan rata-rata dari GIC adalah 26%. PDRB Jakarta Timur sepanjang tahun 1999 - 2002, meningkat sampai 10.9%.

Pertumbuhan Jakarta Selatan pada tahun 1999 - 2002 bisa dikategorikan pro poor, walaupun *Growth Incidence Curves* tidak seperti huruf 'u' terbalik, namun penduduk miskin lebih merasakan manfaat pertumbuhan daripada penduduk menengah atas. Hal ini dipertegas dengan garis trend yang menunjukkan slope negatif. 1 - 19 percentil penduduk terbawah merasakan manfaat 30% - 45%, dan merupakan kelompok percentil yang paling banyak merasakan manfaat pertumbuhan. Sedangkan penduduk menengah, yakni pada percentil 20 - 68 menikmati pertumbuhan sebesar 28% - 30%. Sedangkan kelompok menengah atas, yakni pada percentil 69 - 94 menikmati pertumbuhan lebih tinggi daripada kelompok menengah, yakni 28% - 36%. Sedangkan kelompok teratas, percentil 95 - 100, mengalami pertumbuhan negatif sampai (-8%).

Gambar 4.15. GIC Jakarta Timur Tahun 2002 - 2005



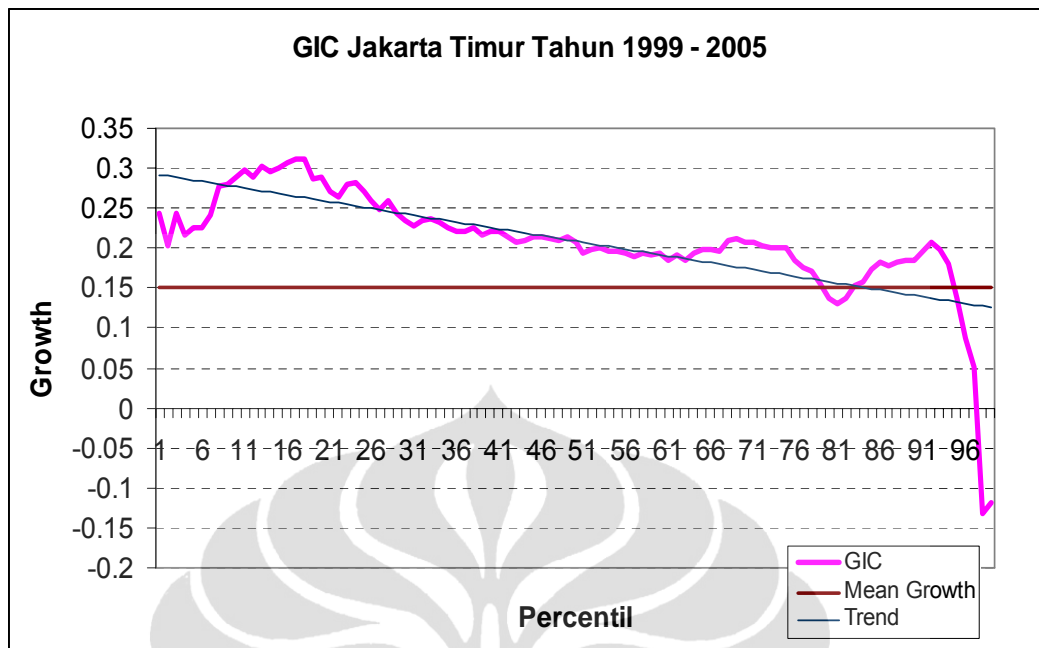
Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2002 – 2005 menunjukkan pertumbuhan konsumsi di Jakarta Timur hanya mencapai 0 sehingga rata-rata GIC hanya berada pada level (-0.09). PDRB Jakarta Timur sepanjang tahun 2002 – 2005, meningkat sampai 18%, namun tidak ada peningkatan konsumsi.

Pertumbuhan Jakarta Timur pada tahun 2002 – 2005 dikategorikan *pro poor* atau *pro poor growth*. Dikatakan tidak *pro poor* karena penduduk yang berada di percentil diatas lebih tidak dirugikan (-4%) daripada 5 percentil terbawah (-16%).

Sedangkan kelompok menengah kebawah, percentil 6 – 70, lebih tidak dirugikan oleh pertumbuhan negatif (-9% sampai 1%) dengan bentuk seperti huruf “u” terbalik. Sedangkan kelompok menengah atas merasakan kerugian akibat pertumbuhan sampai (-14% sampai -9%), sehingga bisa dikatakan lebih *pro poor*.

Gambar 4.16. GIC Jakarta Timur Tahun 1999 - 2005



Sumber : Diolah dari data Susenas 1999, 2002, dan 2005.

*Growth Incidence Curves* di Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 1999 - 2005 menunjukkan pertumbuhan Jakarta Timur mencapai 32% dengan rata-rata dari GIC adalah 26%.

Pertumbuhan Jakarta Selatan pada tahun 1999 – 2005 bisa dikategorikan *pro poor*, walaupun *Growth Incidence Curves* tidak seperti huruf ‘u’ terbalik, namun penduduk miskin lebih merasakan manfaat pertumbuhan daripada penduduk menengah atas. Hal ini dipertegas dengan garis trend yang menunjukkan slope negatif. Selain itu, 1 - 30 percentil penduduk terbawah merasakan manfaat 20% – 30%, dan merupakan kelompok percentil yang paling banyak merasakan manfaat pertumbuhan. Sedangkan kelompok menengah atas, yakni pada percentil 31 – 96 menikmati pertumbuhan lebih tinggi daripada kelompok menengah, yakni 13% - 20%. Sedangkan kelompok teratas, percentil 97 – 100, mengalami pertumbuhan negatif sampai (-13%).

Dari GIC Jakarta Timur, dapat disimpulkan;

1. kedua periode baik periode krisis (1999 – 2002) maupun periode 2002 – 2005 di kategorika *pro poor growth*. Namun periode krisis lebih dirasakan manfaatnya baik oleh orang miskin maupun orang kaya. Sedangkan periode gabungan (1999 – 2005) menunjukkan karakteristik pertumbuhan yang hampir sama dengan periode pertumbuhan rendah, yakni *pro poor growth*..
2. Sehingga masih dapat disimpulkan, untuk daerah Jakarta Timur, hipotesis pertama terpenuhi; cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro, tidak sepenuhnya tepat karena pertumbuhan tidak dinikmati oleh orang miskin, tetapi lebih dinikmati oleh orang kaya.
3. Pada periode 1999 - 2002, dengan PDRB Jakarta Timur sepanjang periode 1999 – 2002, 10.9% peningkatan konsumsi naik sampai 45%, namun periode 2002 – 2005 dengan pertumbuhan selama periode mencapai 18%, konsumsi tidak mengalami kenaikan dan hanya dialami oleh 2 % penduduk sedangkan sisanya merasakan pertumbuhan negatif.

GIC Jakarta Timur yang dalam kedua periode *pro poor growth* membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam apa yang terjadi pada kelompok miskin di Kota Administrasi Jakarta Timur. Untuk itu, peneliti memilih masyarakat yang tinggal di daerah terlarang, yang notabene berada di percentil terbawah

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pemerintah terhadap penduduk miskin dan juga mendapatkan informasi apakah pertumbuhan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan efektif untuk mengurangi kemiskinan? maka dilakukan penelitian dengan metode kualitatif; kuesioner dan *indepth interview* dan Participatory Rural Appraisal (PRA) terhadap masyarakat yang tinggal di Kolong Jembatan Cawang

## 4. 2. Kualitatif

### 4.2.1. Daerah Penelitian

#### 4.2.1.1. DKI Jakarta

Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia mempunyai luas 661,52 Km<sup>2</sup>, terletak pada 6 ° 12' Lintang Selatan, 106 ° 48' Bujur Timur dan 7 m diatas permukaan laut. DKI Jakarta dahulu dikenal dengan nama Sunda Kelapa (397-1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia (1619-1942), dan Djakarta (1942-1972).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 1986/200 tanggal 27 Juli 2000 pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Setiap Kota Administrasi atau Kabupaten terdiri atas beberapa Kecamatan dan setiap Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan.

Tabel 4.2. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di DKI Jakarta tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kecamatan (unit)	Kelurahan (unit)	RW (unit)	RT (unit)
1	Kep. Seribu	11,81	2	6	24	119
2	Jakarta Barat	126,15	8	56	556	6117
3	Jakarta Pusat	47,90	8	44	371	4.382
4	Jakarta Selatan	145,73	10	65	573	6363
5	Jakarta Timur	187,73	10	65	686	7668
6	Jakarta Utara	142,20	6	31	385	4462
	Total	661,52	44	267	2596	29.111

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan salah satu dari 2 provinsi di Indonesia yang tidak memiliki daerah tertinggal. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, angka kemiskinan di DKI Jakarta jauh lebih kecil. Pada tahun 1999 angka kemiskinan nasional mencapai 23,5%, sedangkan angka kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun yang sama hanya 3.99%. Angka kemiskinan yang terendah di DKI Jakarta pada tahun 2001 yakni 3.14%, sedangkan angka kemiskinan nasional mencapai 18.4%.



Tabel 4.3. Jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan Indeks harga Konsumen di DKI Jakarta Tahun 1999 - 2005

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (Ribuan jiwa) DKI Jakarta	Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta	IHK DKI Jakarta (1999=100)
1999	379.60	3.99	100.00
2000	416.10	4.96	104.62
2001	247.50	3.14	116.48
2002	286.88	3.42	129.57
2003	294.10	3.42	137.69
2004	277.10	3.18	146.16
2005	316.20	3.61	160.37

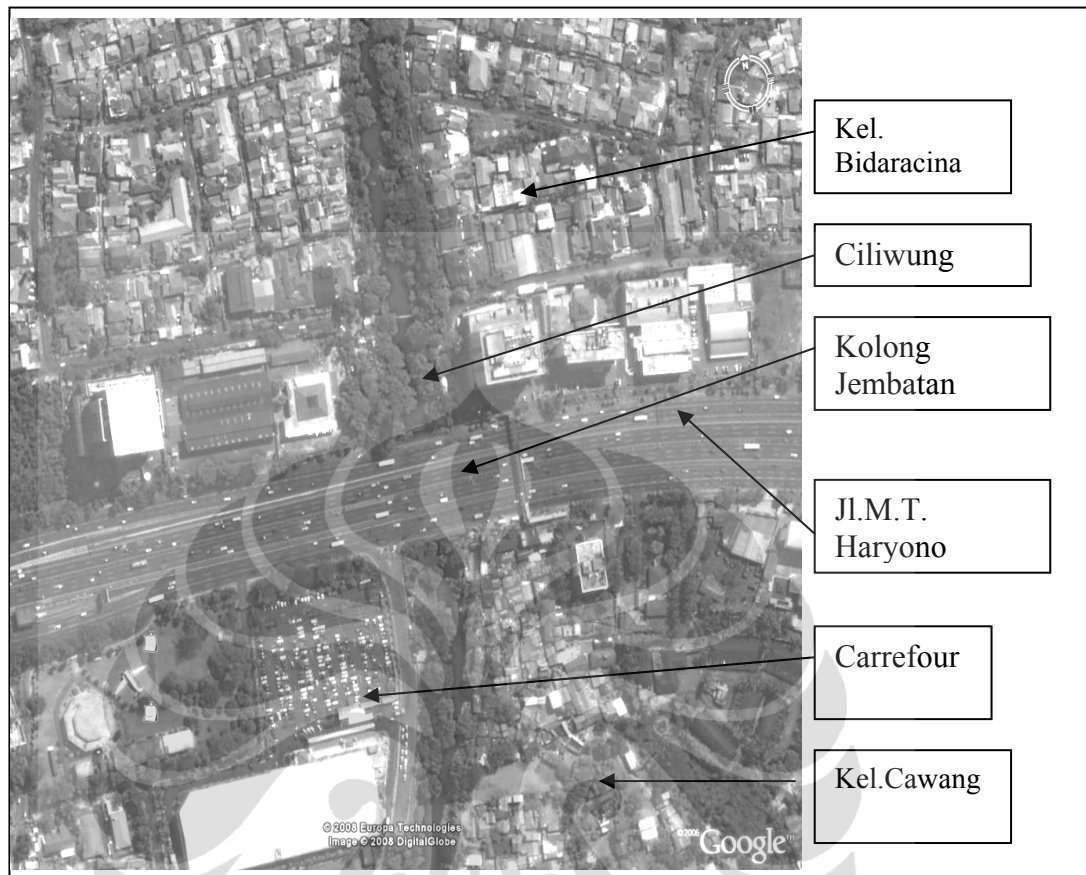
Sumber: BPS (diolah)

#### 4.2.1.2. Kolong Jembatan Cawang

Penelitian berlokasi di pinggiran Sungai Ciliwung Cawang tepatnya di bawah kolong jembatan Jl. M.T Haryono, Cawang Jakarta Timur, (untuk selanjutnya cukup ditulis dengan warga kolong). Warga kolong tinggal di bawah kolong jembatan aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di perbatasan Kelurahan Cawang dan Kelurahan Bidara Cina. Disini terdapat 26 gubuk yang dihuni oleh 100 – 150 orang yang dibangun dalam 2 baris dan dipisahkan oleh jalan kecil dengan ukuran 1 Meter. Gubuk ini berlantai 2 dengan luas 2 x 3 m dan ketinggian lantai dasar 1 meter, dan ketinggian lantai berikutnya, 2 meter dan langsung berantapkan bangunan jembatan. Bangunan didirikan dengan potongan-potongan papan dan triplek.

Penelitian dilakukan sejak Mei 2008, melalui tahapan, observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* dan *Participatory rural appraisal* (PRA).

Gambar 4.19. Lokasi Penelitian



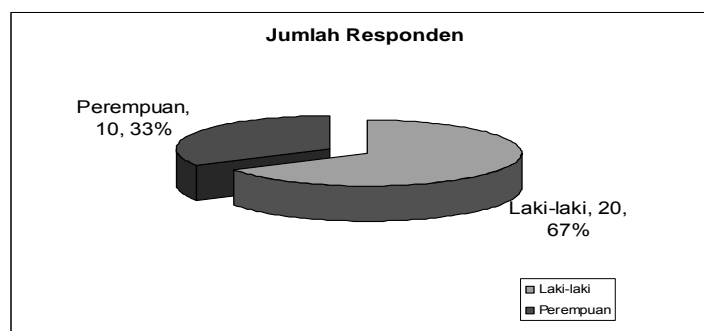
Sumber : foto satelit, <http://www.map.google.com>

#### 4.2.2. Temuan lapangan

##### 4.2.2.1. Deskripsi Responden

Dari 30 keluarga yang diwawancarai oleh peneliti, 10 keluarga diwakili oleh perempuan dan 20 keluarga diwakili oleh laki-laki. Untuk menyeimbangkannya, peneliti melaksanakan FGD khusus untuk perempuan.

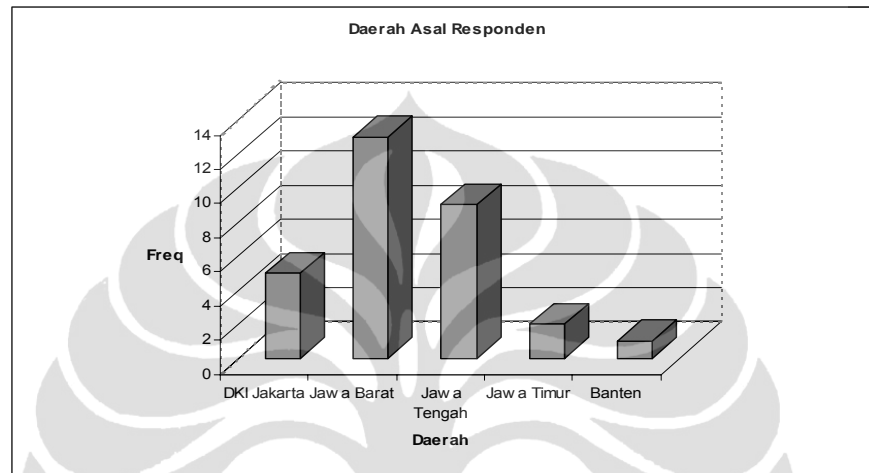
Gambar 4.20. Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

Sebagian besar responden berasal dari Jawa Barat (13 KK) dan Jawa Tengah (9 KK). Hanya 5 KK yang bukan berasal dari luar DKI Jakarta. Sedangkan sisanya, Jawa Timur (2 KK), dan Banten (1 KK).

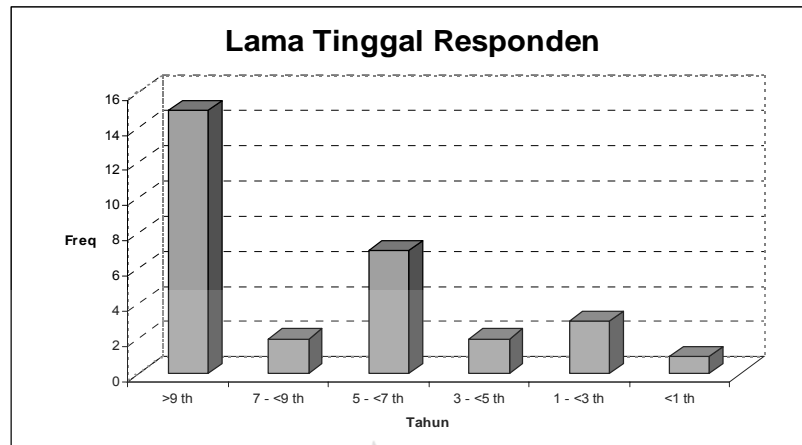
Gambar 4.21. Daerah Asal responden



Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

Walaupun sebagian besar warga kolong berasal dari luar daerah namun, mereka telah menetap di kolong jembatan Cawang, lebih dari setahun. Jika Susenas yang didasarkan pada seluruh penduduk dengan konsep yaitu sudah 6 bulan (atau kurang tetapi menyatakan akan tinggal) dalam suatu wilayah. Maka sebagian besar warga kolong yang tinggal di kolong jembatan M.T. Haryono Cawang masuk dalam data Susenas.

Gambar.4.22. Lama Tinggal Responden di Lokasi Penelitian



Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

#### 4.2.2.2. Pekerjaan dan Penghasilan

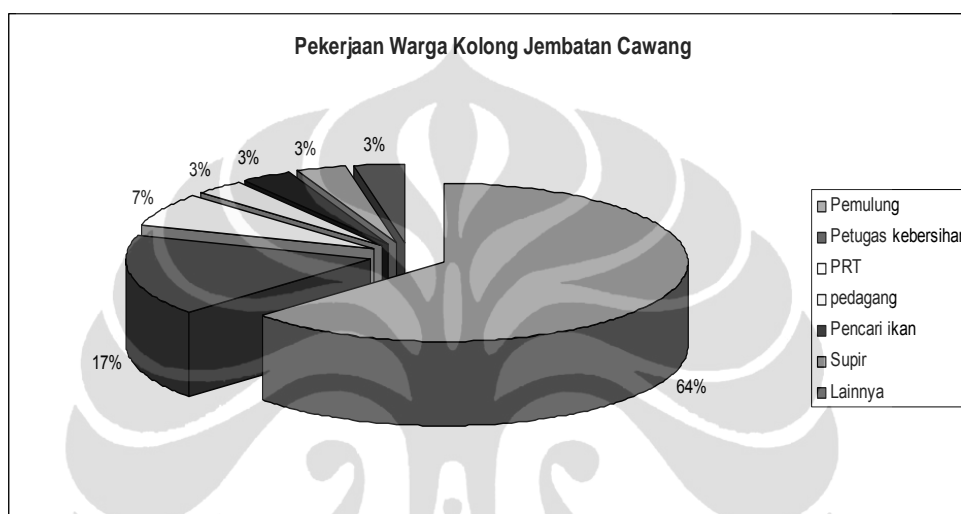
Sebagian besar laki-laki (64%) yang tinggal di kolong jembatan ini bekerja sebagai pemulung yang mengumpulkan barang-barang bekas hasil pulungan di rumah mereka dan jual seminggu sekali dengan harga RP 40.000 – Rp. 150.000/ orang. Setiap keluarga biasanya yang menjadi pemulung lebih dari 1 orang, yaitu anak laki-laki yang tidak lagi bersekolah. Sedangkan perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah sekitar pemukiman mereka.

Pekerjaan dominan lainnya adalah petugas kebersihan pemerintah daerah DKI Jakarta (17%), misalnya Agus Kurniawan (36 tahun), bapak dua orang anak ini bekerja *outsourcing* di Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bertugas mengangkut sampah, dengan penghasilan Rp 600.000 per bulan. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, biasanya Agus mencari tambahan penghasilan sebagai pemulung. Sebelum tinggal di kolong jembatan, Agus mengontrak di “atas” Kelurahan Cawang. Namun paska tahun 1999, Agus tidak sanggup membayar uang kontrakan sehingga membangun gubuk dan menetap di kolong jembatan. namun, meskipun telah menjalani dua pekerjaan, Kedua anaknya, yang berumur 6 tahun dan 12 tahun tidak bersekolah karena ketiadaan biaya.

Pekerjaan lainnya adalah pembantu rumah tangga (7%), pedagang (3%), supir pribadi (3%), dan pengemis (3%). Pekerjaan pengemis dilakukan oleh Ibu Munjanah (60 tahun). Ibu yang mempunyai 3 putra ini tinggal sendirian di gubuknya. Untuk makan sehari-hari, biasanya Ibu Munjanah dibantu oleh

tetangganya. Sedangkan ketiga putranya yang tinggal tidak jauh dari kolong tidak bisa dimintai pertolongan karena telah berkeluarga dan mempunyai kehidupan masing-masing yang pas-pasan. Ibu yang meskipun mempunyai KTP dengan alamat rumah anaknya ini juga tidak mendapatkan bantuan dari program pemerintah. Berikut Gambar pekerjaan dan penghasilan warga kolong.

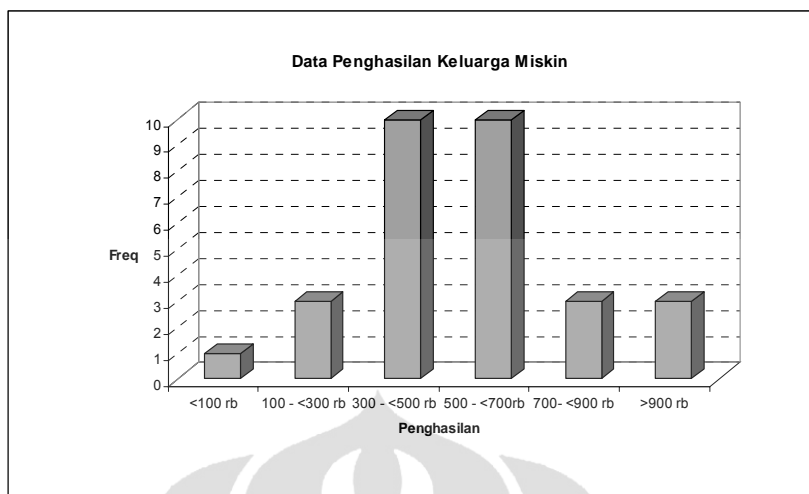
Gambar. 4.23. Pekerjaan Warga Kolong Jembatan Cawang



Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

Sebagian besar warga kolong (20 KK) berpendapatan Rp. 300.000 – Rp 700.000. Sementara ada 3 KK yang berpenghasilan antara Rp 700.000 – Rp 900.000. Dan 3 KK lagi yang berpenghasilan lebih dari Rp 900.000. Sementara 3 KK berpenghasilan rendah antara Rp 100.000 – Rp 300.000 merupakan pemulung yang berusia lanjut. Dan ada 1 orang yang berpenghasilan dibawah Rp 100.000 merupakan perempuan usia lanjut yang berusia 65 tahun yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penghasilan, sedangkan keluarga yang berpenghasilan di atas rata-rata biasanya memiliki dua penghasilan dari pekerjaan yang berbeda.

Gambar 4.24. Pendapatan Warga Kolong Jembatan Cawang



Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

#### 4.2.2.3. Identitas Kependudukan

Dari 30 orang yang diwawancarai di kolong jembatan ini, hanya 5 orang yang memiliki KTP tetap. Mereka adalah keluarga yang berasal dari warga sekitar yang mengontrak di salah satu rumah “di atas” namun karena tidak sanggup membayar biaya kontrakan akhirnya mereka pindah dan tinggal di bawah kolong jembatan ini.

Sedangkan keluarga lain yang tidak mempunyai KTP DKI Jakarta beralasan bahwa pengurusan KTP mahal dan rumit. Harga pengurusan KTP, sebesar 250.000-Rp.300.000. Sedangkan ketua RT mengatakan harga pengurusan KTP tidak akan semahal itu namun warga tidak bisa mengurus KTP karena tidak memiliki surat pindah dari daerah asalnya. Tanpa KTP, warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ini tidak terdata sebagai penduduk di Kelurahan Cawang. Akibatnya, mereka tidak bisa untuk mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah. Seperti Raskin, BLT, Jamkesmas, dll.

Dari 30 responden, 7 orang memiliki KTP musiman. Ketua RT 06 Agus Suhana menjelaskan bahwa KTP musiman merupakan inisiatif darinya, “Kalau sesuatu terjadi di jalan, mereka tahu harus diantar kemana” Pak RT menjelaskan. Dia menambahkan bahwa masyarakat yang memiliki KTP musiman ini tidak terdata sebagai penduduk di Kelurahan Cawang. Sehingga walaupun warga kolong memiliki KTP musiman, mereka tidak dapat mengakses bantuan.

Padahal ketua RT 06, telah mengusulkan data penduduk yang tinggal di bawah kolong jembatan Cawang kepada kelurahan, agar mereka dapat mengakses program bantuan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, namun dalam data program bantuan setiap tahun, nama mereka tetap tidak tercantum.

Tabel 4.4. Hubungan Status Kependudukan Dengan Akses Terhadap Program

Hubungan Status Kependudukan Dengan Akses Terhadap Program						
Status Kependudukan	Program					
	Pendidikan		Kesehatan		Pangan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
KTP Jakarta	1	4	3	2	1	4
KTP JKT Musiman	-	9	-	9	-	9
KTP Daerah	-	9	-	9	1	8
Tidak Punya KTP	-	7	-	7	-	7
Total	1	29	3	27	2	28

Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

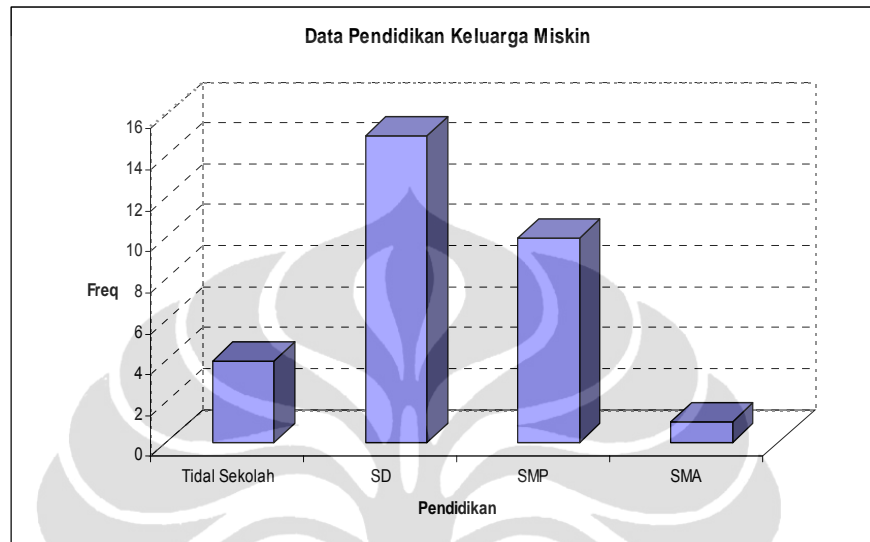
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari kelima koresponden yang memiliki KTP, semuanya dapat mengakses salah satu program. Sebaliknya, responden yang tidak memiliki KTP tidak satupun dapat mengakses program penanggulangan kemiskinan. Begitu juga dengan warga kolong yang memiliki KTP musiman. Sedangkan 9 responden yang memiliki KTP daerah asal, hanya 1 KK yang dapat mengakses program yakni program raskin, itupun karena kedekatannya dengan Ketua RW Kelurahan Cawang.

#### 4.2.2.4. Pendidikan

Untuk pendidikan, hampir sebagian besar warga kolong hanya berpendidikan sampai SD (15), bahkan sebagian besarnya tidak tamat. Untuk SMP, hanya 10 orang. Hanya 1 orang yang mengaku berpendidikan SMA. Untuk anak-anak usia sekolah biasanya mereka mengenyam pendidikan hanya sampai SD. Alasannya sekolah gratis hanya sampai SD, kebanyakan dari mereka tidak

mengetahui SMP yang juga memberikan pendidikan gratis. Beberapa anak yang sangat berminat untuk melanjutkan ke SMP biasanya di sekolahkan di kampung.

Gambar 4.25. Pendidikan Warga Kolong Jembatan



Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

Tabel 4.5. Crosstab Penghasilan dengan Pendidikan

Crosstab Penghasilan Vs Pendidikan				
Penghasilan	Pendidikan			
	TS	SD	SMP	SMA
<100	1	-	-	-
100-<300	1	1	-	1
300-<500	-	4	6	-
500-<700	2	7	1	-
700-<900	-	2	1	-
>900	-	1	2	-
<b>Total</b>				<b>30</b>

Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi jumlah penghasilan. Yang memiliki penghasilan tertinggi bukanlah orang yang memiliki pendidikan tertinggi. Penghasilan tertinggi malah dinikmati oleh orang dengan tingkat pendidikan hanya sampai SD dan SMP. Hal ini menunjukkan pekerjaan tidak berkorelasi dengan pendidikan. Meskipun tamatan SMA, tetapi karena usia yang telah lanjut membuat pendapatan menjadi



kecil. Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka lebih mengandalkan tenaga dari pada status pendidikan.

Tidak adanya korelasi antara pekerjaan dan penghasilan membuat warga kolong merasa pendidikan tidaklah penting. Mereka beranggapan, menyelesaikan sekolah sampai bangku SMP atau tidak menamatkan SD, penghasilannya sama saja. Walaupun hampir 50 % memiliki anak-anak usia sekolah namun hanya 3 keluarga yang menyekolahkan anak-anak mereka, keluarga Maman memiliki anak di bangku SMP (kelas 3) dan SD (kelas 1) dan keluarga Ntin memiliki 1 orang anak (5 SD) dan 1 orang cucu (1 SD) . kedua keluarga ini berpenghasilan diatas Rp 900.000.

Apalagi ditambah dengan mahalanya biaya pendidikan, walaupun biaya sekolah gratis, namun biaya yang dikeluarkan untuk seragam, buku, ekstrakurikuler, transport, jajan dll, tidaklah sedikit. Misalnya saja Maman yang menyekolahkan anaknya di SMP 154 harus mengeluarkan biaya Rp. 10.000 – Rp. 15.000 perhari untuk ongkos dan makan siang. Dan setahun sekali Maman membeli seragam anak-anaknya Rp 45.000 untuk setiap seragam, dimana untuk SMP memiliki 6 seragam (putih-putih, putih-biru/merah, batik, pramuka, muslim dan olahraga). Ekstrakurikuler Rp.100.000/bulan, dan biaya buku Rp 25.000/buku.

Tidak adanya korelasi langsung antara pendidikan dan penghasilan serta mahalanya biaya pendidikan membuat warga kolong banyak yang tidak menyekolahkan anaknya. Mereka berharap tidak hanya sekolah yang gratis namun juga biaya-biaya lainnya seperti seragam, buku, ekstrakurikuler juga gratis.

#### **4.2.2.5. Kesehatan**

Warga kolong Jembatan Cawang memiliki 2 puskesmas, 1 Klinik dan 1 Rumah Sakit yang bisa diakses, yakni puskesmas Bendungan untuk Kelurahan Cawang dan Puskesmas Kp. Dalam untuk Kelurahan Bidara Cina, Klinik Yakrida, dan Rumah Sakit Tebet. Dari keempat fasilitas ini, Puskesmas Kp. Dalam yang paling sering diakses warga karena letaknya yang paling dekat dengan kolong.

Walaupun, fasilitas kesehatan dekat dan mudah dijangkau, warga kolong mengaku jarang berobat ke Puskesmas, selain masalah biaya, urusan administrasi yang berbelit-belit membuat warga malas berobat.

Untuk berobat ke Puskesmas warga membayar Rp. 1000 untuk kartu puskesmas dan Rp.2.000 – 15.000/ kunjungan. Jika mempunyai Jamkesmas, maka seluruh pengobatan gratis. Namun demikian, mendapat Jamkesmas tidaklah mudah. Warga mengaku harus mengeluarkan minimal Rp 10.000. untuk setiap tandatangan.

Dari 30 KK yang diwawancarai, hanya 1 orang yang memiliki Jamkesmas. Jamkesmas ini diperoleh oleh Tina Rahmawati (17 tahun) ketika persalinan anak pertamanya yang mengharuskan ia melahirkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun karena ketiadaan biaya akhirnya keluarga berusaha mengurus Jamkesmas, untungnya keluarga ini dulunya merupakan salah satu keluarga yang mengontrak “diatas” dan memiliki KTP.

Warga kolong berharap, mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar secara gratis tanpa dihalangi masalah administrasi. “Harusnya dengan surat keterangan miskin dari RT, ga kena biaya tapi tetap aja disuruh bayar” ujar Suwirman.

Hak atas kesehatan warga kolong tidak terpenuhi karena mereka tidak mempunyai KTP. Untuk berobat gratis, mereka harus mengurus Kartu Jamkesmas yang membutuhkan KTP. Surat keterangan miskin atau KTP sementara tetap tidak bisa membantu mereka mengakses fasilitas kesehatan secara gratis.

#### **4.2.2.6. Sarana dan Prasarana**

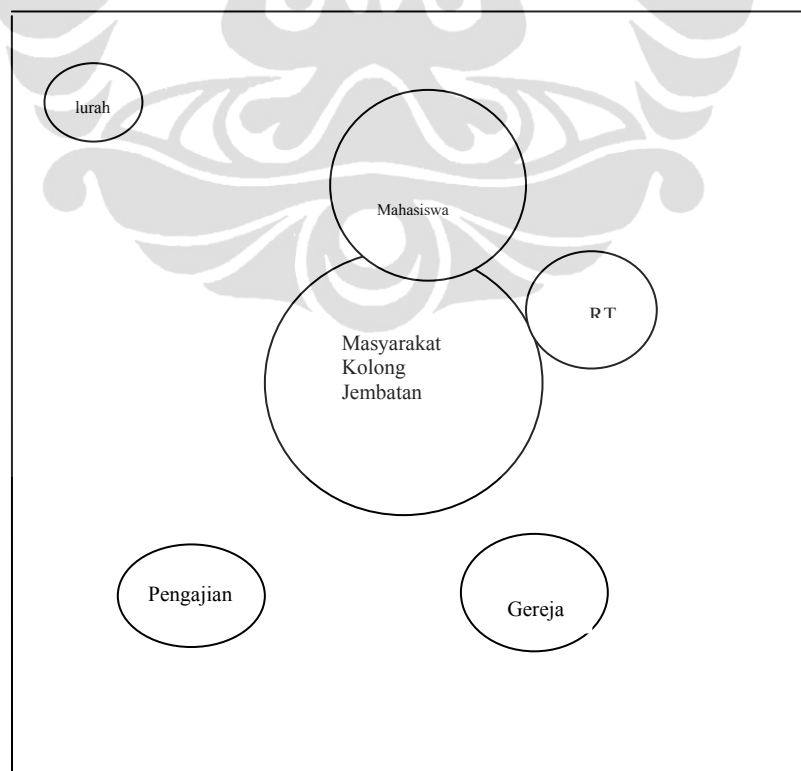
Gelapnya kondisi bangunan membuat listrik dinyalakan selama 24 jam, dan untuk ini setiap KK membayar uang sepuluh ribu kepada ”orang diatas”. Untuk kebutuhan air ke 30 KK ini biasanya menggunakan 2 sumur yang mereka buat sendiri di masing-masing ujung jembatan untuk mandi dan mencuci. Sedangkan, untuk minum, biasanya mereka membeli air galon. Sedangkan untuk pembuangan, masyarakat disini langsung menggunakan sungai.

#### 4.2.2.7. Sosial Capital

Secara umum warga kolong jembatan ini memiliki kehidupan terpisah dari masyarakat sekitar. Warga kolong jembatan ini yang kebanyakan berasal dari Jawa Barat mempunyai kumpulan pengajian yang diadakan seminggu sekali di rumah warga. Setiap pertemuan ini mereka masing-masing mengumpulkan uang RP 3000/KK untuk digunakan sebagai pinjaman jika warga membutuhkan, misalnya sakit, melahirkan dll. Namun karena ketidakpercayaan mereka kepada koordinator warga yang menurut mereka sering menggelapkan uang dan bantuan, akhirnya aktifitas ini dihentikan. Bahkan sampai sekarang mereka tidak mempunyai pemimpin dan mengandalkan ketua RT untuk mendapatkan bantuan jika terkena banjir

#### 4.2.2.8. Hubungan Kelembagaan

Gambar 24.1. Diagram Venn Hubungan Kelembagaan Warga Kolong



Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Mei 2008.

Dari diagram venn hubungan kelembagaan diatas didapati bahwa hanya 5 institusi/ lembaga yang memiliki hubungan dengan penduduk kolong jembatan yakni; mahasiswa, RT, Pengajian, Gereja dan kelurahan.

#### 1. **Mahasiswa;**

Masyarakat sangat antusias ketika menjelaskan mengenai mahasiswa. Mereka menjelaskan bahwa dulu sebelum banjir menghanyutkan rumah mereka tahun lalu, sekelompok mahasiswa secara rutin mendatangi mereka seminggu sekali, yakni hari Sabtu untuk memberikan pelajaran gratis terhadap anak-anak mereka. Pelajaran berupa belajar membaca dan mengaji. Namun ketika mereka kembali setelah banjir, sekelompok mahasiswa tersebut tidak pernah datang lagi. Dalam FGD dengan beberapa ibu, mereka menyatakan akan kebutuhan untuk pelajaran gratis seperti yang dilakukan sekelompok mahasiswa sebelumnya. Yang pertama untuk mengajari Balita mereka untuk belajar membaca dan menulis karena untuk mengantarkan anak mereka untuk sekolah di TK sangat mahal. Yang kedua untuk mengajar mengaji, mereka tidak mempunyai wadah untuk mengajarkan mengaji, “diatas ada tapi bayar” ujar salah satu ibu. Beberapa keluarga memilih anaknya untuk mengaji di kampung.

#### 2. **RT**

Sebenarnya RT merupakan lembaga yang paling banyak disinggung oleh masyarakat kolong. RT yang ‘mengakomodir’ masuknya listrik ketempat mereka. Cukup dengan membayar Rp. 10.000/KK/perbulan kepada oknum tertentu warga bisa menikmati listrik selama 24 jam. RT juga yang mengkoordinasi jika ada individu atau lembaga yang mau menyumbang. Biasanya bantuan berupa sembako diberikan ke RT dan RT yang akan membagi ke warga. Namun, ketika ditanyakan ‘mana yang lebih dekat dan bermanfaat RT atau mahasiswa?’, hampir semua peserta FGD menjawab “mahasiswa”.

### 3. Gereja

Rutin, hampir sebulan sekali, warga didatangi oleh suatu gereja yang rajin memberikan bantuan berupa sembako, namun warga menilai bantuan yang diberikan gereja tidak tulus “Kalau ga ikut doa ga dikasih, kadang dikasih juga tapi diomel-omelin dulu, jadi kita males” ujar salah satu Ibu.

### 4. Pengajian

Warga kolong jembatan ini yang kebanyakan berasal dari Jawa Barat mempunyai kumpulan pengajian yang diadakan seminggu sekali di rumah warga. Setiap pertemuan ini mereka masing-masing mengumpulkan uang RP 3000/KK untuk digunakan sebagai pinjaman jika warga membutuhkan, misalnya sakit, melahirkan dll. Namun karena ketidakpercayaan mereka kepada koordinator warga yang menurut mereka sering menggelapkan uang dan bantuan, akhirnya aktifitas ini dihentikan. Bahkan sampai sekarang mereka tidak mempunyai pemimpin dan mengandalkan ketua RT untuk mendapatkan bantuan jika terkena banjir.

### 5. Kelurahan

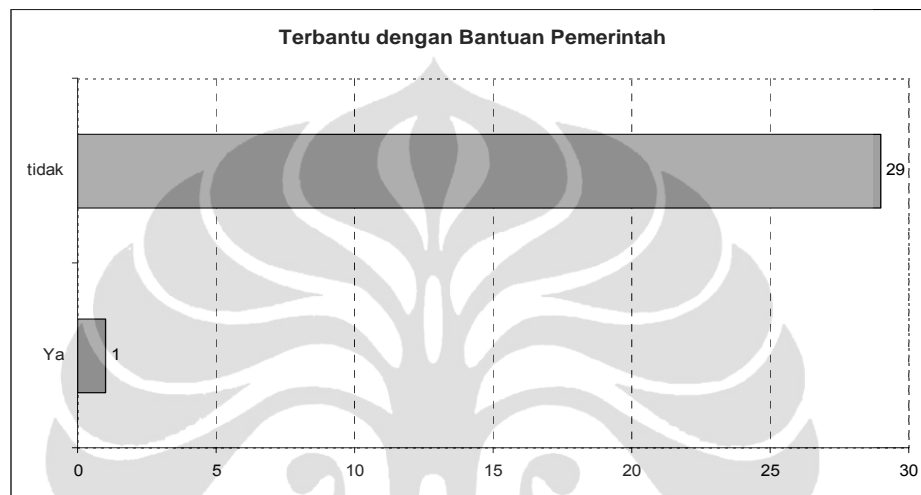
Warga kolong jembatan sangat jarang berinteraksi dengan kelurahan, yang mereka ingat mengenai kelurahan adalah ancaman pengusuran yang dikeluarkan oleh oknum dari kelurahan “siap-siap ya, akhir agustus 2008, tempat ini mau dibersihin” ujar mereka meniru ucapan oknum dari kelurahan.

#### 4.2.2.9. Aksesibilitas Program Pemerintah

Bantuan melalui program penanggulangan kemiskinan seharusnya juga diperoleh warga kolong jembatan Cawang Jakarta Timur, namun dari hasil wawancara dan FGD terhadap keluarga yang tinggal di bawah kolong jembatan, hanya sebagian kecil yang tahu (apalagi mendapatkan) program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah hampir tidak menyentuh warga kolong jembatan Cawang Jakarta Timur. Begitu juga dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemda di daerah asal mereka. Dari 30 orang yang diwawancarai, hanya 1 orang yang merasa terbantu oleh pemerintah.

Gambar 4.27. Aksesibilitas warga kolong terhadap program pemerintah



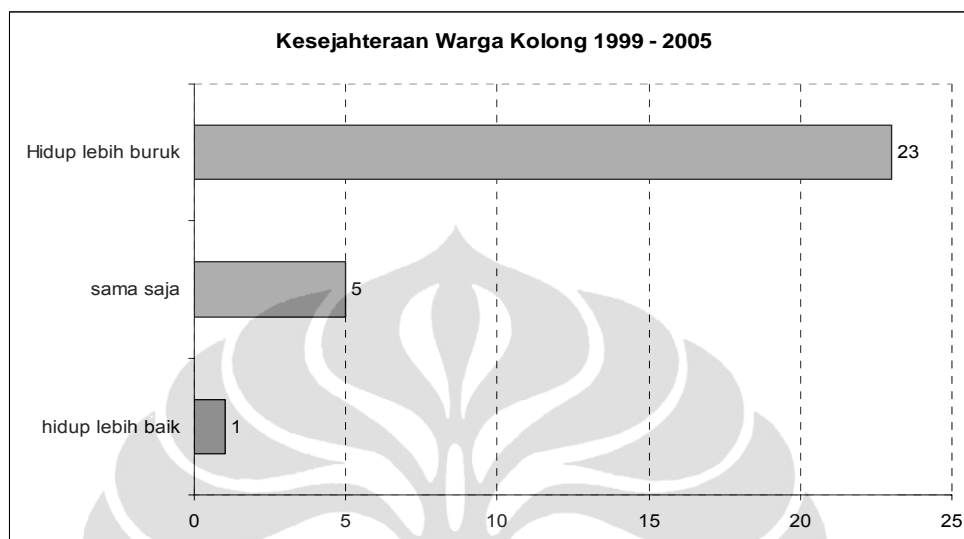
Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

Alasannya Mereka tidak dianggap sebagai penduduk Jakarta, karena walaupun sebagian kecil dari mereka mempunyai KTP DKI Jakarta, lokasi tempat tinggal mereka tidak masuk kedalam wilayah administrasi daerah manapun. Walaupun mereka berinteraksi dengan 2 RT setempat namun itu dilakukan di luar wilayah formal misalnya kutipan Rp 10.000/bulan untuk biaya listrik, kutipan jika ada warga 'atas' yang hajatan, dll. Sedangkan dengan Kelurahan Bidara Cina, interaksi yang dilakukan dengan warga adalah interaksi negatif yakni berupa ancaman penggusuran.

Sedangkan program bantuan seperti BLT, Kredit Usaha Menengah, JPS, Jamkesmas dan Raskin asing di telinga mereka. Hanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat dinikmati oleh keluarga yang menyekolahkan anak mereka. Begitu juga dengan daerah asal mereka. Walaupun sebagian besar

masih memiliki KTP aktif di daerah asalnya masing-masing namun mereka tidak terdata untuk mendapatkan bantuan seperti BLT, dll.

Gambar 4.28. Kesejahteraan warga kolong



Sumber: Diolah dari penelitian lapangan bulan Maret - Mei 2009.

23 responden menganggap hidup setelah tahun 1998 lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan beberapa keluarga yang dulunya masih mampu mengontrak di 'atas' Kelurahan Cawang terpaksa pindah dan tinggal di bawah kolong. Berapapun angka pertumbuhan, baik dalam masa krisis maupun pada masa pertumbuhan tinggi tidak memiliki efek apapun terhadap warga kolong. Begitu juga dengan program penanggulangan kemiskinan, sebanyak apapun program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh warga kolong.

Dari temuan diatas dapat disimpulkan bahwa **permasalahan administrasi membuat program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tidak berdampak apapun terhadap warga kolong**. Berbagai bantuan pemerintah yang pemberiannya melalui RT/RW tidak dapat diakses oleh warga kolong karena secara administrasi mereka dianggap tidak ada

Dari perspektif pemerintah, pemerintah menganggap mereka tidak ada karena tempat tinggal mereka bertentangan dengan Perda DKI Jakarta No 11

tahun 1988 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sehingga tidak aneh jika pemerintah tidak ikut berperan aktif meningkatkan taraf hidup mereka. Jikapun pemerintah, ikut campur tangan, maka yang dilakukan oleh pemerintah pertama kalinya adalah menggusur mereka. Menggusur mereka tanpa skema penyelesaian masalah maka hanya akan menjadi aksi pencabutan hak warga.

Namun jika pemerintah menganggap mereka tidak ada, kenyataan dilapangan, penduduk yang tinggal di kolong jembatan ini tidak sendiri, menurut data BPS, untuk tahun 2005 jumlah penduduk Jakarta yang menempati lokasi tak layak huni seperti kawasan kumuh, penghuni bantaran kali, pinggiran rel kereta api, dan kolong jalan layang mencapai 33.230 jiwa.

Oleh pemerintah DKI Jakarta, penyelesaian permasalahan ini terlihat dari alokasi anggaran penertiban (penggusuran) rakyat miskin, daerah DKI Jakarta mencapai Rp 303,2 milyar jauh lebih besar dari dinas pendidikan dasar sebesar Rp 188 milyar. Bahkan lebih jauh lagi dibandingkan anggaran Puskesmas seluruh sebesar Rp 200 milyar dan seluruh rumah sakit sebesar Rp 122,4 milyar (Sucipto, 2007).

Tindakan pemerintah yang melakukan penggusuran warga yang tinggal di daerah terlarang. Membuat statement 'kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan' menjadi "wacana aneh" bagi warga kolong. Jangankan berharap untuk dibantu oleh pemerintah, tidak digusur saja sudah merupakan hal yang sangat disyukuri oleh warga kolong.

Jika warga kolong dan warga yang tinggal di daerah terlarang lainnya dianggap ilegal, seharusnya tidak terlihat dalam GIC karena mereka tidak terdata dalam BPS. Namun disinilah terletak kerancuan program penanggulangan kemiskinan. Jika GIC berasal dari Susenas yang didasarkan pada seluruh penduduk dengan konsep yaitu sudah 6 bulan (atau kurang tetapi menyatakan akan tinggal) dalam suatu wilayah. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil registrasi penduduk yang tercatat dikelurahan. Dimana kedua data ini dikeluarkan oleh BPS.



Hal ini bisa dilihat dalam Jumlah penduduk DKI Jakarta di Sensus 2000 tercatat 8,4 juta jiwa sedangkan dari registrasi penduduk 2003 hanya mencapai sekitar 7,5 juta jiwa berarti ada perbedaan sekitar 1 juta jiwa (11%). Yang tidak tercatat di kelurahan hampir sebagian besar adalah orang miskin. Sehingga menanggulangi kemiskinan dengan data yang tidak memunculkan orang miskin sama saja seperti membuang garam kedalam laut, sia-sia.

Selain permasalahan data, argumentasi yang menyatakan ‘pemerintah tidak memenuhi hak warganegara yang tinggal di daerah terlarang karena bertentangan dengan Perda’ juga tidak bisa diterima. Dalam Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan (Asshiddiqie, 2006)<sup>37</sup> Jelas terlihat Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988 jauh berada di bawah UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 2004, yang memuat dasar dari RPJM 2004 – 2009. Dimana menurut Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang berada diurutan bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berada di atas urutannya. Sehingga, tidak benar, dengan alasan penegakan Perda DKI Jakarta No.11 tahun 1988, pemerintah bebas dari kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara.

---

<sup>37</sup> Menurut UU No. 10 Tahun 2004, tata urut peraturan perundang-undangan adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah (Perda) meliputi Perda Provinsi, Perda Kab/Kota dan peraturan desa/setingkat